

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023
(Audited)



Jl. Gatot Subroto No. 54D Magelang
Kode Pos 56123. Telp/Fax : (0293) 362645
Homepage : <https://magelangkota.bps.co.id>
E-mail : bps3371@bps.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPS Kota Magelang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pusat Statistik yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPS Kota Magelang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPS Kota Magelang. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Magelang, 6 Mei 2024
Kepala



Aluisius Arranta, SST, M.A
NIP. 197910052002121003

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Lampiran	vi
Indek Singkatan	vii
Pernyataan Tanggung Jawab	viii
I. Ringkasan	1
II. Laporan Realisasi Anggaran Perbandingan	3
III. Neraca Perbandingan	4
IV. Laporan Operasional Perbandingan	5
V. Laporan Perubahan Ekuitas Perbandingan	6
VI. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	7
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	14
A.3 Basis Akuntansi	14
A.4 Dasar Pengukuran	14
A.5 Kebijakan Akuntansi	15
B. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	23
B.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak	24
B.2 Belanja Negara	27
B.3 Belanja Pegawai	30
B.4 Belanja Barang	33
B.5 Belanja Modal	36
B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33
C. Penjelasan Atas Pos-pos Neraca	38
C.1 Belanja dibayar dimuka	38
C.2 Persediaan	38
C.3 Tanah	43
C.4 Peralatan dan Mesin	44
C.5 Gedung dan Bangunan	46
C.6 Aset Tetap Lainnya	47
C.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	47

	Halaman
C.8 Aset Tak Berwujud	48
C.9 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	49
C.10 Utang Kepada Pihak Ketiga	50
C.11 Ekuitas	51
D. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional	52
D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak	52
D.2 Beban Pegawai	53
D.3 Beban Persediaan	55
D.4 Beban Barang dan Jasa	56
D.5 Beban Pemeliharaan	60
D.6 Beban Perjalanan Dinas	62
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	63
D.8 Kegiatan Non Operasional	64
E. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	66
E.1 Ekuitas awal	66
E.2 Surplus/defisit-LO	66
E.4 Transaksi Antar Entitas	66
E.4.1 Diterima dari entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	67
E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar	67
E.5 Ekuitas Akhir	69
F. Pengungkapan – Pengungkapan Lainnya	70

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian Tabel	Halaman
Tabel 1	Laporan Capaian Output Prioritas Nasional Per 31 Desember 2023	11
Tabel 2	Laporan Capaian Output Per 31 Desember 2023	11
Tabel 3	Laporan Realisasi Belanja Dalam Rangka Penanganan COVID-19 Per Per 31 Desember 2023	13
Tabel 4	Rincian Penyisihan Piutang Berdasarkan Kualitas Piutang	17
Tabel 5	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	20
Tabel 6	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	21
Tabel 7	Rincian Anggaran Untuk periode yang berakhir Per 31 Desember 2023	23
Tabel 8	Rincian Anggaran Berdasarkan Program dan Jenis Belanja Untuk periode yang berakhir Per 31 Desember 2023	23
Tabel 9	Rincian Revisi DIPA sampai dengan Per 31 Desember 2023	24
Tabel 10	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Untuk periode yang berakhir Per 31 Desember 2023	25
Tabel 11	Perbandingan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	27
Tabel 12	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023	27
Tabel 13	Perbandingan Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	28
Tabel 14	Rincian Anggaran Belanja menurut Program Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023	29
Tabel 15	Perbandingan Belanja Pegawai Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	30
Tabel 16	Perbandingan Belanja Barang Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	33
Tabel 17	Laporan Realisasi Anggaran Belanja dalam rangka COVID-19 Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023	35
Tabel 18	Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	36
Tabel 19	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	36
Tabel 20	Rincian Belanja Dibayar Dimuka 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	36
Tabel 21	Rincian Persediaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	38
Tabel 22	Rincian Saldo Tanah Sampai 31 Desember 2023	44
Tabel 23	Rincian Akumulasi Penyusutan Sampai 31 Desember 2023	48
Tabel 24	Rincian Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2023	48
Tabel 25	Rincian Jenis Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2023	49
Tabel 26	Rincian Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	50
Tabel 27	Rincian Utang Pada Pihak Ketiga 2023 dan 2022	50

Tabel	Uraian Tabel	Halaman
Tabel 28	Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	52
Tabel 29	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pegawai Sampai 31 Desember 2023	52
Tabel 30	Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	53
Tabel 31	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pegawai Sampai 31 Desember 2023	55
Tabel 32	Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	56
Tabel 33	Rincian Beban Barang dan Jasa sampai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	59
Tabel 34	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Barang dan Jasa Sampai 31 Desember 2023	60
Tabel 35	Rincian Beban Pemeliharaan Sampai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	61
Tabel 36	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pemeliharaan 31 Desember 2023	61
Tabel 37	Rincian Perjalanan Dinas sampai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	62
Tabel 38	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Perjalanan Dinas Sampai 31 Desember 2023	63
Tabel 39	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Sampai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	63
Tabel 40	Rincian Kegiatan Non Operasional Sampai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	64
Tabel 41	Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas	66
Tabel 42	Rincian Nilai Transfer Masuk 31 Desember 2023	68

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Akumulasi Penyusutan (A1)
2. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan/KDP (A2)
3. Laporan Sistem Akuntansi Instansi (Monsakti)
4. Laporan Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN)
5. Laporan Barang Milik Negara (Monsakti)
6. Berita Acara Rekonsiliasi
7. Surat Rekening Bendaharawan
8. Rekap Monitoring Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan
9. Rekap Kerjasama dan Hibah
10. MOU dan PKS
11. Rekap Daftar Rekening
12. Rekening Koran Satker
13. Rincian Belanja Barang Persediaan
14. Memo Penyesuaian
15. Kartu Kendali
16. Bukti Pendukung
17. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
18. Daftar Bank Garansi dan Jaminan Pemeliharaan
19. Lampiran Lainnya
20. Telaah Laporan Keuangan
21. DIPA Awal dan Dipa Revisi Terakhir
22. Lampiran A3 Hibah
23. Monitoring Utang Pihak Ketiga

INDEKS SINGKATAN

APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LKKL	:	Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
CaLK	:	Catatan atas Laporan Keuangan
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	:	Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAKTI	:	Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
SAK	:	Sistem Akuntansi Keuangan
SAI	:	Sistem Akuntansi Instansi
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
LO	:	Laporan Operasional
LPE	:	Laporan Perubahan Ekuitas
KUN	:	Kas Umum Negara
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
TP	:	Tuntutan Perbendaharaan
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
KDP	:	Konstruksi Dalam Pengerjaan
UP	:	Uang Persediaan
SSBP	:	Surat Setoran Bukan Pajak
SSPB	:	Surat Setoran Pengembalian Belanja
SATKER	:	Satuan Kerja
KPPN	:	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
PPAKP	:	Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RPJM	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RENSTRA	:	Rencana Strategis
COVID-19	:	<i>Corona Virus Disease</i> 2019
PC PEN	:	Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MAGELANG

*Jl. Gatot Subroto 54D Magelang 56123, Telp.(0293) 362645 Fax.(0293)362645
Homepage: <http://magelangkota.bps.go.id>, E-mail : bps3371@bps.go.id*

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BPS Kota Magelang yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Magelang, 6 Mei 2024
Kepala



Aluisius Abrianta, SST, M.A.
NIP. 19791005 200212 1 003

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BPS Kota Magelang Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp61.993.647,00 atau 6.424,21 persen dari estimasi pendapatan-LRA sebesar Rp965.000,00.

Realisasi Belanja Negara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.379.793.774,00 atau mencapai 99,06 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp5.430.637.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp4.535.219.047,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp23.416.019,00, Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00, Aset Tetap (netto) sebesar Rp4.502.962.403,00, dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp8.840.625,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp112.745.668,00 dan Rp4.422.473.379,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.232.890,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp5.574.739.536,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp5.572.506.646,00. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit pos-pos luar biasa masing-masing sebesar Rp56.587.182,00 dan sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp5.515.919.464,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp4.230.139.412,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp5.515.919.464,00 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp5.708.253.431,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp4.422.473.379,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BPS KOTA MAGELANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023		% terhadap Anggaran	31 Desember 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	965.000	61.993.647	6.424,21	42.364.032
JUMLAH PENDAPATAN		965.000	61.993.647	6.424,21	42.364.032
BELANJA NEGARA	B.2	5.430.637.000	5.379.793.774	99,06	6.690.327.748
Belanja Pegawai	B.3	3.324.358.000	3.310.341.616	99,58	3.566.338.289
Belanja Barang	B.4	2.068.779.000	2.032.252.158	98,23	3.123.989.459
Belanja Modal	B.5	37.500.000	37.200.000	99,20	0
JUMLAH BELANJA		5.430.637.000	5.379.793.774	99,06	6.690.327.748

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

BPS KOTA MAGELANG NERACA PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET			
ASET LANCAR			
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1	483.880	264.658
Persediaan	C.2	22.932.139	39.504.045
Jumlah Aset Lancar		23.416.019	39.768.703
ASET TETAP			
Tanah	C.3	3.068.112.000	3.068.112.000
Peralatan Dan Mesin	C.4	2.011.631.272	1.889.986.499
Gedung Dan Bangunan	C.5	1.015.915.000	1.015.915.000
Aset Tetap Lainnya	C.6	56.426.954	56.426.954
Akumulasi Penyusutan	C.7	(1.649.122.823)	(1.733.646.721)
Jumlah Aset Tetap		4.502.962.403	4.296.793.732
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.8	36.425.000	36.425.000
Akumulasi Penyusutan/amortisasi Aset Lainnya	C.9	(27.584.375)	(20.084.375)
Jumlah Aset Lainnya		8.840.625	16.340.625
JUMLAH ASET		4.535.219.047	4.352.903.060
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.10	112.745.668	122.763.648
JUMLAH KEWAJIBAN		112.745.668	122.763.648
EKUITAS			
Ekuitas	C.11	4.422.473.379	4.230.139.412
JUMLAH EKUITAS		4.422.473.379	4.230.139.412
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		4.535.219.047	4.352.903.060

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

BPS KOTA MAGELANG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	2.232.890	2.142.032
JUMLAH PENDAPATAN		2.232.890	2.142.032
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	3.299.944.210	3.559.794.665
Beban Persediaan	D.3	157.994.348	95.918.028
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.211.306.395	2.310.676.808
Beban Pemeliharaan	D.5	179.067.277	119.438.200
Beban Perjalanan Dinas	D.6	524.901.690	615.031.500
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	201.525.616	171.484.453
JUMLAH BEBAN		5.574.739.536	6.872.343.654
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(5.572.506.646)	(6.870.201.622)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
	D.8	0	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		59.575.757	3.600.000
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		185.000	37.800.000
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		3.173.575	102.575
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		56.587.182	41.297.425
SURPLUS/DEFISIT		(5.515.919.464)	(6.828.904.197)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BPS KOTA MAGELANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Ekuitas awal	E.1	4.230.139.412	4.343.035.622
Surplus/defisit-LO	E.2	(5.515.919.464)	(6.828.904.197)
Transaksi Antar Entitas	E.3	5.708.253.431	6.716.007.987
Diterima dari entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	E.3.1	5.317.800.127	6.647.963.716
Transfer Masuk/Transfer Keluar	E.3.2	390.453.304	68.044.271
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		192.333.967	(112.896.210)
Ekuitas Akhir	E.4	4.422.473.379	4.230.139.412

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Entitas dan
Rencana
Strategis

A.1. Profil Dan Kebijakan Teknis BPS Kota Magelang

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah institusi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei, untuk menghasilkan data dan statistik yang dibutuhkan baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat pada umumnya sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999. Sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan, penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi sangat menentukan karena akan berdampak kepada efektifitas pengambilan keputusan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik untuk menentukan arah kebijakan dan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan mewujudkan visi BPS.

Untuk menyongsong pembangunan nasional jangka menengah tahun 2020-2024, BPS menyusun Rencana Strategis yang mencerminkan upaya peningkatan dan kemampuan BPS menyediakan data statistik yang berkualitas, serta upaya untuk menjalankan perannya- sebagai pembina dan koordinator kegiatan statistik dalam kerangka pembangunan Sistem Statistik Nasional (SSN) secara lebih efektif. Rencana Strategis Badan Pusat Statistik (Renstra BPS) tahun 2020-2024, disusun berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan RPJM Nasional Tahun 2020-2024, serta memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dalam mencapai tujuannya, BPS memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi BPS:

“Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju”

(“*Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia*“).

Misi BPS:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; dan

4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Melalui visi dan misi tersebut, BPS memiliki aspirasi untuk mencapai tujuan strategis. Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang akan dilakukan oleh BPS dalam periode Renstra 2020-2024, yakni bahwa BPS berupaya terus menerus untuk meningkatkan:

1. Kualitas dari produk yang dihasilkannya (data statistik);
2. Kualitas dari pelayanan untuk mendiseminasi data statistik kepada pengguna;
3. Efektifitas di dalam melakukan pembinaan dan koordinasi kegiatan statistik;
4. Kualitas dari proses tata kelola (*governance*) di dalam organisasinya.

Untuk mencapai tujuan strategis tersebut diwadahi dalam sejumlah program, yakni:

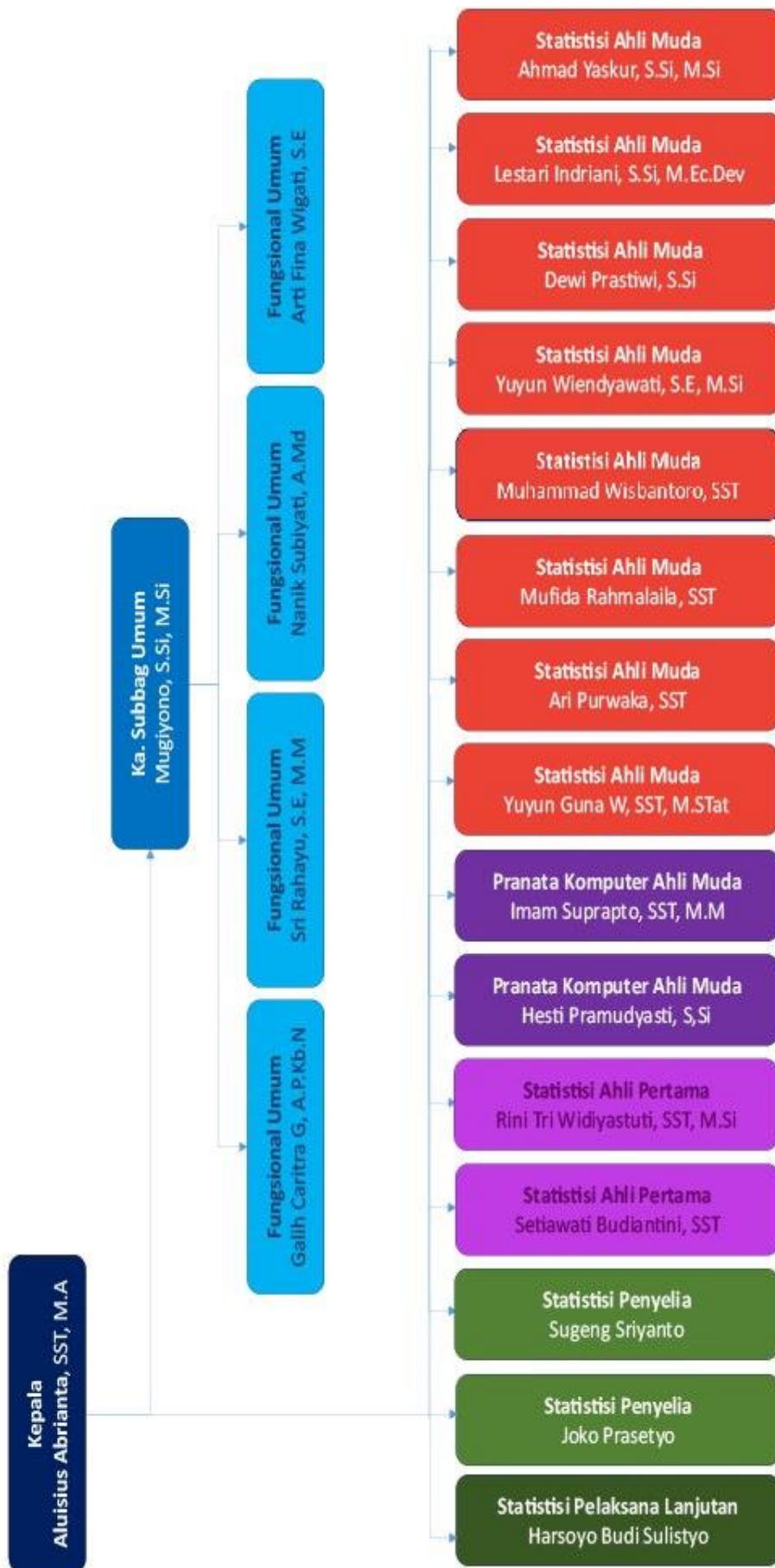
1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Program ini bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan Informasi statistik tersebut, BPS secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan dan pengembangan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik.
2. Program Dukungan Manajemen BPS. Program Generik BPS ini bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam program ini diarahkan untuk:
 - a. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM statistik yang unggul melalui sekolah kedinasan dan pusat Pendidikan pelatihan;
 - b. Kegiatan operasional penyelenggaraan Lembaga dan evaluasi kegiatan, penyediaan alokasi gaji pegawai, dan peningkatan fungsi kehumasan;
 - c. Memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah;
 - d. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi barang diseluruh satuan kerja BPS Pusat maupun Daerah.

Organisasi dan Tata Kerja BPS Kota Magelang

Badan Pusat Statistik sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 mempunyai Perwakilan BPS di Daerah yang merupakan Instansi Vertikal BPS di Daerah. Badan Pusat Statistik Kota Magelang yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No.54 D, Magelang, Jawa Tengah, didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan di bidang Statistik.

Organisasi dan tata kerja BPS Kota Magelang diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota periode 31 Desember 2023 yaitu sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI BPS KOTA MAGELANG



Capaian Output BPS Kota Magelang

Sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2023, BPS Kota Magelang mengelola 28 rincian output dengan rincian 21 output pada program Penyediaan dan pelayanan Informasi Statistik dan 7 output pada program Dukungan Manajemen. Dari 28 rincian output tersebut, BPS Kota Magelang mengelola 6 output Prioritas Nasional. Rincian 6 output Prioritas Nasional tersebut terdiri dari:

1. Publikasi/Laporan Penyusunan Disagregasi PMTB (2898.QMA.008).
2. Publikasi/Laporan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (2907.QMA.009).
3. Publikasi/Laporan Statistik E-Commerce (2908.QMA.009).
4. Publikasi/Laporan Sensus Pertanian (2910.QMA.006).
5. Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan (2910.QMA.007).
6. Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Kerangka Sampel Area (2910.QMA.010).

Rincian laporan capaian output dari 6 output prioritas nasional tersebut tersaji pada tabel berikut:

Tabel 1
Laporan Capaian Output Prioritas Nasional
Per 31 Desember Tahun 2023

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2898.QMA008	Publikasi/Laporan Penyusunan Disagregasi PMTB	9.357.000	8.992.945	96,11	1 Layan an	1 Layan an	100%
2	2907.QMA009	Publikasi/Laporan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi	377.389.000	377.368.300	99,99	1 Layan an	1 Layan an	100%
3	2908.QMA009	Publikasi/Laporan Statistik E-Commerce	3.495.000	3.045.000	87,12	1 Layan an	1 Layan an	100%
4	2910.QMA006	Publikasi/Laporan Sensus Pertanian	414.994.000	413.778.467	99,71	1 Layan an	1 Layan an	100%
5	2910.QMA007	Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan	14.390.000	12.889.800	89,57	1 Layan an	1 Layan an	100%
6	2910.QMA010	Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi dengan KSA	24.076.000	23.308.500	96,81	1 Layan an	1 Layan an	100%
Jumlah			843.701.000	839.383.012	99,46			

Tabel 2
Laporan Capaian Output Per 31 Desember Tahun 2023

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2896. BMA004	Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik	2.400.000	1.200.000	50,00	1 Layan an	1 Layan an	100%
2	2897. BDB003	Laporan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	3.000.000	2.878.000	95,93	1 Lembaga	1 Lembaga	100%
3	2897. BMA004	Laporan Diseminasi dan Metadata Statistik	25.780.000	23.065.000	89,47	1 Layan an	1 Layan an	100%
4	2898. BMA007	Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran	33.827.000	33.505.127	99,05	1 Layan an	1 Layan an	100%
5	2899. BMA006	Publikasi/Laporan Neraca Produksi	40.809.000	40.118.000	98,31	1 Layan an	1 Layan an	100%
6	2900. BMA005	Dokumen, Laporan, dan Publikasi Pengembangan Metodologi dan Sensus	8.920.000	8.780.000	98,43	1 Layan an	1 Layan an	100%
7	2902. BMA004	Publikasi/Laporan Statistik Distribusi	10.720.000	10.289.500	95,98	1 Layan an	1 Layan an	100%
8	2903. BMA009	Publikasi/Laporan Statistik Harga	62.052.000	55.963.400	90,19	1 Layan an	1 Layan an	100%
9	2904. BMA006	Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan, dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi	46.993.000	46.639.200	99,25	1 Layan an	1 Layan an	100%
10	2905. BMA004	Publikasi/Laporan SAKERNAS	129.732.000	129.025.100	99,46	1 Layan an	1 Layan an	100%
11	2906. BMA006	Publikasi/Laporan SUSENAS	264.437.000	262.336.318	99,21	1 Layan an	1 Layan an	100%
12	2907. BMA006	Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial	5.544.000	5.267.000	95,00	1 Layan an	1 Layan an	100%
13	2908. BMA004	Publikasi/Laporan Statistik Keuangan Teknologi Informasi dan Pariwisata	17.495.000	17.253.000	98,62	1 Layan an	1 Layan an	100%
14	2909. BMA005	Publikasi/Laporan Stat. Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Terbit Tepat Waktu	1.065.000	660.000	61,97	1 Layan an	1 Layan an	100%

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Penyelesaian	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
15	2910. BMA008	Publikasi/Laporan Statistik Hortikultura dan Perkebunan	4.947.000	4.722.000	95,45	1 Layan an	1 Layan an	100%
16	2886. EBA956	Layanan BMN	2.790.000	2.488.500	89,19	1 Layan an	1 Layan an	100%
17	2886. EBA962	Layanan Umum	19.665.000	19.376.700	98,53	1 Layan an	1 Layan an	100%
18	2886. EBA994	Layanan Perkantoran	3.846.687.000	3.831.500.917	99,61	2 Layan an	2 Layan an	100%
19	2886. EBB951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	37.500.000	37.200.000	99,2	1 Dokum en	1 Dokum en	100%
20	2886. EBD952	Layanan Perencanaan dan Anggaran	6.097.000	5.566.000	91,29	1 Dokum en	1 Dokum en	100%
21	2886. EBD955	Laporan Manajemen Keuangan	14.400.000	14.390.000	99,93	3 Dokum en	3 Dokum en	100%
22	2886. EBD961	Layanan Reformasi Kinerja	2.076.000	2.007.000	96,68	1 Dokum en	1 Dokum en	100%
Jumlah			4.586.966.000	4.554.230.762	99,29			

Anggaran Belanja Dalam Rangka COVID-19 BPS Kota Magelang

Anggaran belanja dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada tahun 2023 adalah semula dianggarkan sebesar Rp200.000,00, berupa Belanja Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19 (521241) yang melekat pada kegiatan Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (2900.BMA005). Anggaran tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi yang ada saat ini, sehingga anggaran tersebut direvisi ke dalam pos perjalanan dinas dalam kota. Laporan realisasi belanja dalam rangka Covid-19 adalah sebagai berikut;

Tabel 3
Laporan Realisasi Belanja Dalam Rangka Penanganan COVID-19
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023

Kode	Uraian	Anggaran Semula (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)	Realiasi Belanja (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	% Realisasi
521241	Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19	200.000	0	0	0	0,00
Jumlah		200.000	0	0	0	0,00

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPS Kota Magelang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

BPS Kota Magelang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPS Kota Magelang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan
Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan BPS Kota Magelang Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik yang merupakan entitas pelaporan dari BPS Kota Magelang. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPS Kota Magelang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Pendapatan
-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan
-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Pusat Statistik Kota Magelang adalah sebagai berikut:
 - ✚ Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - ✚ Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - ✚ Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset
Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Rincian Penyisihan Piutang Berdasarkan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

*Aset
Tetap*

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pada Tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Pelaksanaan revaluasi dilakukan dengan pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan / atau pendekatan pendapatan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset
Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah

sebagai berikut:

Tabel 5
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang
Jangka
Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset
Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 81/KM.6/2018 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban (6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas **(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BPS Kota Magelang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 10 kali dari DIPA awal, sebesar Rp6.200.917.000,00 setelah revisi terakhir menjadi sebesar Rp5.430.637.000,00.

Tabel 7

Rincian Anggaran Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023

Uraian	2023	
	ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp)
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	965.000	965.000
Pendapatan Lain-Lain	0	0
Jumlah Pendapatan	965.000	965.000
Belanja		
BELANJA PEGAWAI	3.734.738.000	3.324.538.000
BELANJA BARANG	2.428.679.000	2.068.779.000
BELANJA MODAL	37.500.000	37.500.000
Jumlah Belanja	6.200.917.000	5.430.637.000

Tabel 8

Rincian Anggaran Berdasarkan Program dan Jenis Belanja Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023

Uraian	2023	
	ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp)
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	1.949.201.000	1.501.422.000
BELANJA BARANG	1.949.201.000	1.501.422.000
BELANJA MODAL	0	0
Program Dukungan Manajemen	4.251.716.000	3.929.215.000
BELANJA PEGAWAI	3.734.738.000	3.324.538.000
BELANJA BARANG	479.478.000	567.177.000
BELANJA MODAL	37.500.000	37.500.000
Jumlah Belanja	6.200.917.000	5.430.637.000

Tabel 9
Rincian Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Sampai dengan 31 Desember 2023

Revisi Ke	Tanggal Revisi	Anggaran Semula (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan Revisi
1	28-12-2022	6.200.917.000	6.200.917.000	0	DJA
2	27-02-2023	6.200.917.000	6.224.067.000	23.150.000	DJA
3	31-03-2023	6.224.067.000	6.232.966.000	0	DJPB
4	27-05-2023	6.232.966.000	6.232.966.000	8.899.000	DJPB
5	11-07-2023	6.232.966.000	6.227.334.000	(5.632.000)	DJA
6	17-07-2023	6.227.334.000	5.999.776.000	(227.558.000)	DJA
7	06-10-2023	5.999.776.000	5.622.177.000	(377.599.000)	DJA
8	17-07-2023	5.622.177.000	5.400.542.000	(221.635.000)	DJA
9	17-07-2023	5.400.542.000	5.430.637.000	30.095.000	DJPB
10	17-07-2023	5.430.637.000	5.430.637.000	0	DJPB

Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Magelang selama periode laporan adalah sebanyak 10 kali baik revisi dengan kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB). Revisi ini meliputi pencadangan anggaran (*automatic adjustment*) TA 2023, realokasi anggaran baik dari BPS pusat maupun BPS Provinsi Jawa Tengah ke BPS kabupaten/Kota maupun revisi antar satker serta revisi POK. Penjelasan secara rinci terkait revisi DIPA pada point F. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya (F.2. Pengungkapan Lain – Lain, F.2.2 Revisi Anggaran).

Realisasi
PNBP
Rp61.993.647
,00

B.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp61.993.647,00 atau mencapai 6.424,21 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp965.000,00. Rincian Estimasi dan realisasi Pendapatan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023

Uraian	2023		
	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	% Real Anggaran
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	965.000	61.808.647	6.405,04
Pendapatan Lain-lain	0	185.000	0,00
Jumlah	965.000	61.993.647	0

Realisasi pendapatan 31 Desember 2023 sebesar Rp61.993.647,00 atau 6.424,21 persen dari yang dianggarkan terdiri dari:

1. Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, iuran Badan Usaha dan penerimaan klaim asuransi BMN sebesar Rp61.808,647,00 berupa:
 - a. Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya sebesar Rp59.575.757,00 berupa penjualan 9 (Sembilan) unit kendaraan dinas bermotor yang kondisinya sudah rusak berat dengan risalah lelang nomor 1845/37/2023 tanggal 16 November 2023 dan bukti penerimaan Negara NTPN No.7E16661QUR6G4CEA tanggal 17 November 2023, sebagaimana terlampir dalam lampiran laporan PNBPN.
 - b. Pendapatan dari pemanfaatan BMN, pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan sebesar Rp2.232.890,00. Pendapatan ini berupa sewa rumah dinas tipe C sebesar Rp202.990,00 setiap bulan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Nomor. 019/XII/33/Tahun 2022 tanggal 19 Desember 2022. Sedangkan untuk Izin Penghunian Rumah Dinas Nomor.008.32/I/33/Tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021 atas nama Sri Herawati, S.Si, M.M, yang mana izin penghunian tersebut telah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Nomor. 09 Tahun 2023 tanggal 28 Februari 2023. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Nomor.020/III/33 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Izin penghunian rumah Negara golongan I Badan Pusat Statistik Kota Magelang atas nama Aluisius Abrianta, SST, M.A, berlaku sejak tanggal 1 April 2023.

Pembayaran sewa rumah dinas/negara tersebut dibayar melalui mekanisme pemotongan Surat Perintah Membayar (SPM) gaji induk maupun susulan atas nama penghuni rumah tersebut selama 11 bulan yaitu bulan Januari, Februari, dan April s.d. Desember 2023. Pada bulan Maret 2023 tidak terdapat pendapatan sewa dikarenakan penghuni rumah dinas tersebut purna tugas mulai tanggal 1 Maret 2023, sedangkan penghuni yang baru terhitung mulai tanggal 1 April 2023. Untuk besaran potongan pendapatan sewa tersebut pada bulan Januari 2023 masih menggunakan tarif lama yaitu Rp80.366,00 dan kekurangannya dimintakan pada bulan Februari 2023 melalui SPM gaji induk. Untuk pemotongan pendapatan sewa bulan April 2023 menggunakan gaji susulan dan masih tarif sewa rumah dinas satker asal, sehingga kekurangannya di mintakan pada bulan Mei 2023 melalui SPM gaji induk.

2. Pendapatan lain-lain berupa penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp185.000,00, berupa pengembalian tunjangan umum dikarenakan adanya pegawai yang melaksanakan tugas belajar terhitung sejak 8 Agustus 2022, yang mana pegawai tersebut telah diberhentikan tunjangan fungsionalnya menjadi tunjangan umum. Sedangkan menurut PP 45/2013 jo PP 50/2018 pasal 80 ayat 1 dan 2 serta Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007, Khusus bagi pejabat fungsional yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan, maka tunjangan jabatan fungsionalnya dihentikan terhitung mulai bulan ketujuh. Berdasarkan ketentuan tersebut maka tunjangan fungsional pegawai tersebut dimintakan kembali dan tunjangan umum di kembalikan atau disetor ke kas Negara selama 3 bulan yaitu bulan Desember 2022 s.d Februari 2023. Pengembalian belanja tersebut disetor ke kas negara melalui mekanisme pemotongan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor 00182A tanggal 16 Juni 2023 dengan SP2D 231151301004373 tanggal 16 Juni 2023.

Realisasi pendapatan 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 46,34 persen dibandingkan realisasi pendapatan pada 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan pada periode pelaporan tahun sebelumnya terdapat penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp37.800.000,00, berupa pengembalian tunjangan struktural dikarenakan adanya penyetaraan jabatan dari jabatan struktural eselon IVa menjadi jabatan fungsional tertentu ahli

muda serta adanya pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya sebesar Rp3.600.000,00 berupa penjualan peralatan dan mesin serta serial lainnya.

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Pendapatan
Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023(Rp)	Realisasi 31 Desember 2022(Rp)	Naik (Turun) %
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	61.808.647	4.564.032	1.254,26
Pendapatan Lain-Lain	185.000	37.800.000	(99,51)
Jumlah	61.993.647	42.364.032	46,34

Belanja
Negara
Rp5.379.793
.774,00

B.2. Belanja Negara

Realisasi belanja instansi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.379.793.774,00 atau 99,06 persen dari anggaran belanja sebesar Rp5.430.637.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023

Uraian	2023		
	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	% Real Anggaran
BELANJA PEGAWAI	3.324.358.000	3.310.341.616	99,58
BELANJA BARANG	2.068.779.000	2.032.252.158	98,23
BELANJA MODAL	37.500.000	37.200.000	99,20
Jumlah Netto	5.430.637.000	5.379.793.774	99,06

Realisasi belanja diatas merupakan realisasi bersih yaitu realisasi bruto sebesar Rp5.393.613.774,00 dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp13.820.000,00.

Tabel 13
Perbandingan Realisasi Belanja
sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Naik (Turun) %
BELANJA PEGAWAI	3.310.711.616	3.602.670.166	(8,10)
BELANJA BARANG	2.045.702.158	3.126.757.459	(34,57)
BELANJA MODAL	37.200.000	0	0,00
Jumlah Bruto	5.393.613.774	6.729.427.625	(19,85)
Pengembalian Belanja	13.820.000	39.099.877	(64,65)
Jumlah	5.379.793.774	6.690.327.748	(19,59)

Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya realisasi belanja per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 19,59 persen dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi belanja pegawai mengalami penurunan sebesar 8,10 persen dikarenakan adanya mutasi pegawai baik mutasi masuk/keluar satker selama periode pelaporan. Mutasi masuk selama periode pelaporan sebanyak 2 pegawai, sedangkan mutasi keluar sebanyak 3 pegawai dan 1 pegawai memasuki purna tugas.
2. Realisasi belanja barang mengalami penurunan sebesar 34,57 persen. Penurunan ini dikarenakan pada periode pelaporan sebelumnya selain kegiatan rutin terdapat kegiatan pendataan Sensus Penduduk 2020 Lanjutan (LF-SP2020) dan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Pada periode pelaporan sebelumnya juga masih terdapat belanja barang- Penanganan Pandemi COVID-19 yang mana pada periode pelaporan sudah tidak dianggarkan karena sudah tidak relevan dengan kondisi yang ada.

Sedangkan pada periode pelaporan selain kegiatan rutin juga terdapat kegiatan sensus yaitu pendataan Sensus Pertanian 2023 (ST2023) dan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai lanjutan dari pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), tetapi tidak sama besar dengan periode sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai lanjutan dari pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dilaksanakan pada bulan Mei 2023. Sedangkan untuk kegiatan Sensus Pertanian 2023 (ST2023) dimulai pada bulan Maret 2023 (rekrutmen

petugas), Mei 2023 (pelatihan) dan pendataan lapangan pada bulan Juni 2023.

Selain itu pada periode pelaporan terdapat kegiatan Pendataan Lengkap Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PL-KUMKM) yg dimulai pada bulan September 2023 yang mana anggaran dari kegiatan ini berada pada BPS Provinsi Jawa Tengah.

3. Realisasi belanja modal sebesar Rp37.200.000,00 merupakan pengadaan meubelair baik untuk ruang kepala dan ruang tamu yang terdiri dari meja kerja kayu (meja kerja pimpinan), meja kerja kayu, kursi besi metal dan sice/sofa.

Untuk pengembalian belanja mengalami penurunan sebesar 64,65 persen dibandingkan dengan periode pelaporan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan pada periode pelaporan sebelumnya terdapat pengembalian belanja tunjangan structural sebagai akibat dari adanya penyetaraan jabatan structural ke jabatan fungsional. Sedangkan pada periode pelaporan pengembalian belanja sebagian besar berupa pengembalian belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota terkait kegiatan FKP dan pengembalian belanja tunjangan umum untuk pegawai yang melaksanakan tugas belajar.

Rincian realisasi anggaran menurut program sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

*Tabel 14
Rincian Anggaran Belanja menurut Program Sampai 31 Desember 2023*

Kode	Uraian Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
GG	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	1.501.422.000	1.481.084.657	98,65
WA	Dukungan Manajemen	3.929.215.000	3.912.529.117	99,58
Total Belanja Kotor		5.430.637.000	5.393.613.774	99,32
Pengembalian		0	(13.820.000)	0
Jumlah		5.430.637.000	5.379.793.774	99,06

Berdasarkan tabel di atas, realisasi belanja untuk program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik sebesar Rp1.481.084.657,00 atau 98,65 persen dan untuk program Dukungan Manajemen sebesar Rp3.912.529.117,00 atau 99,58 persen. Sedangkan pengembalian belanja sebesar Rp13.820.000,00 merupakan pengembalian belanja pada program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik sebesar Rp13.450.000,00 dan untuk program Dukungan

Manajemen sebesar Rp370.000,00. Sedangkan untuk komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023



Belanja Pegawai
Rp3.310.341.616,00

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.310.341.616,00 dan Rp3.566.338.289,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian perbandingan belanja pegawai sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 15
Perbandingan Belanja Pegawai
Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.763.732.641	1.994.840.251	(11,59)
Belanja Lembur	39.820.000	11.049.000	260,39
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	1.507.158.975	1.596.780.915	(5,61)
Jumlah Bruto	3.310.711.616	3.602.670.166	(8,10)
Pengembalian Belanja	370.000	36.331.877	(98,98)
Jumlah	3.310.341.616	3.566.338.289	(7,18)

Realisasi belanja pegawai sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 7,18 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS mengalami penurunan sebesar 11,59 persen, hal ini disebabkan karena adanya mutasi baik mutasi keluar maupun masuk selama periode pelaporan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Mutasi masuk 1 pegawai berdasarkan Surat Keputusan Badan Pusat Statistik Jawa Tengah Nomor 1219493/33/KPG Tahun 2022 tanggal 19 Desember 2022 an. Hesti Pramudyasti, S.Si, TMT 1 Januari 2023;
 - b. Mutasi keluar 1 pegawai berdasarkan Surat Keputusan Badan Pusat Statistik Jawa Tengah Nomor 1219493/33/KPG Tahun 2023 tanggal 6 Januari 2023 an. Septania Ayu Wardhani, SST, TMT 1 Februari 2023;
 - c. Purna tugas 1 pegawai berdasarkan Surat Keputusan Badan Pusat Statistik Nomor 33010/15019/AZ/05/22 tanggal 17 Mei 2022 an. Sri Herawati, S.Si, M.M, TMT 1 Maret 2023;
 - d. Mutasi masuk 1 pegawai berdasarkan Surat Keputusan Badan Pusat Statistik Nomor 0308006/KPG Tahun 2023 tanggal 8 Maret 2023 an. Aluisius Abrianta, SST, M.A, TMT 1 April 2023;
 - e. Mutasi keluar 1 pegawai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Tengah Nomor 0530085/33/KPG Tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 an. Fardiana, SP, TMT 1 Juni 2023;
 - f. Mutasi keluar 1 pegawai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0815053/KPG Tahun 2023 tanggal 15 Agustus 2023 an. Nur Hafidhah El Rohim, SST, TMT 1 September 2023.

Selain mutasi masuk/keluar dan purna tugas, pada periode pelaporan juga terdapat kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pegawai dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kenaikan pangkat pegawai periode April 2023 sebanyak 3 pegawai sebagai berikut:
 - Kenaikan pangkat berdasarkan Surat Keputusan Badan Pusat Statistik Jawa Tengah Nomor 0321059/33/KPG Tahun 2023 tanggal 21 Maret 2023 an. Aluisius Abrianta, SST, M.A;
 - Kenaikan pangkat berdasarkan Surat Keputusan Badan Pusat Statistik Jawa Tengah Nomor 0203067/33/KPG Tahun 2023 tanggal 8 Februari 2023 an. Yuyun Guna Winarti, SST, M.Stat;

- Kenaikan pangkat berdasarkan Surat Keputusan Badan Pusat Statistik Jawa Tengah Nomor 0303036/33/KPG Tahun 2023 tanggal 3 Maret 2023 an. Ari Purwaka, SST;
 - b. Kenaikan gaji berkala sebanyak 9 pegawai selama periode pelaporan yaitu bulan Januari 2023 s.d Desember 2023;
2. Belanja lembur mengalami kenaikan sebesar 260,39 persen dikarenakan pada periode pelaporan terdapat kegiatan lembur dalam rangka penyelesaian administrasi kegiatan FKP dan perbaikan data anomali pendataan lengkap Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PL-KUMKM yang dilaksanakan oleh sebagian besar pegawai serta adanya kegiatan pengolahan Regsosek yang mana supervisor pengolahan adalah pegawai organik dan dilaksanakan pada hari sabtu dan minggu. Sedangkan pada periode pelaporan tahun sebelumnya selain lembur atas kegiatan pengolahan data pendataan awal Regsosek yang dilakukan oleh organik di hari sabtu dan minggu dan hanya berupa kegiatan pemenuhan kelengkapan permintaan dokumen pemeriksaan oleh beberapa pegawai;
 3. Belanja tunjangan khusus dan belanja pegawai transito (Tunjangan Kinerja) mengalami penurunan sebesar 5,61 persen, hal ini terjadi sejalan dengan banyaknya mutasi keluar pegawai dibandingkan dengan mutasi masuk selama periode pelaporan;

Total pengembalian belanja pegawai pada periode pelaporan adalah sebesar Rp370.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 98,98 persen. Pengembalian belanja tersebut berupa pengembalian belanja tunjangan umum PNS (511151) sebesar Rp370.000,00 terkait pegawai yang melaksanakan tugas belajar untuk 2 bulan yaitu bulan Januari dan Februari 2023. Sedangkan pengembalian tunjangan umum untuk Desember 2022 menjadi pendapatan lain-lain berupa penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu. Pengembalian belanja tersebut disetor ke kas negara melalui mekanisme pemotongan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor 00182A tanggal 16 Juni 2023 dengan SP2D 231151301004373 tanggal 16 Juni 2023.

Sedangkan pengembalian belanja pegawai pada periode pelaporan tahun sebelumnya sebesar Rp36.331.877,00 merupakan pengembalian belanja yang sebagian besar berasal dari pengembalian tunjangan struktural dan fungsional yang disebabkan adanya penyetaraan jabatan struktural.

Belanja
Barang
Rp2.032.252.
158,00

B.4. Belanja Barang

Realisasi belanja barang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.032.252.158,00 dan Rp3.123.989.459,00. Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 34,95 persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2022. Perbandingan belanja barang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji dalam tabel dibawah ini:

Tabel 16
Perbandingan Belanja Barang
Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	243.003.860	255.037.631	(4,72)
Belanja Barang Non Operasional	834.849.667	1.980.066.654	(57,84)
Belanja Barang Persediaan	117.137.000	80.591.685	45,35
Belanja Jasa	133.292.664	75.001.789	77,72
Belanja Pemeliharaan	179.067.277	119.438.200	49,92
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	538.351.690	616.621.500	(12,69)
Jumlah Bruto	2.045.702.158	3.126.757.459	(34,57)
Pengembalian Belanja	13.450.000	2.768.000	385,91
Jumlah	2.032.252.158	3.123.989.459	(34,95)

Rincian penurunan realisasi belanja barang sebesar 34,95 persen adalah sebagai berikut:

1. Belanja barang operasional turun sebesar 4,72 persen, dikarenakan pada periode pelaporan sebelumnya terdapat pengadaan pakaian dinas pegawai dan belanja penanganan pandemi COVID-19 serta adanya perubahan penganggaran terkait honor Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang mana selama 9 bulan pada akun belanja keperluan perkantoran (521111) dan 3 bulan pada akun belanja jasa lainnya (522191). Sedangkan pada periode pelaporan honor pengelola anggaran mengalami kenaikan sesuai dengan PMK Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023, dan untuk honor PPNPN (petugas keamanan kantor, pramubhakti dan kebersihan) mengalami kenaikan sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sesuai dengan keputusan

Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/54/Tahun 2022 tentang upah minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, tanggal 7 Desember 2022. Selain itu pada periode pelaporan jumlah Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) berjumlah 5 orang sedangkan pada periode pelaporan tahun sebelumnya pada bulan Januari 2022 berjumlah 3 orang, Februari 2022 berjumlah 4 orang dan Maret s.d. Juni 2022 berjumlah 5 orang.

2. Belanja barang non operasional turun sebesar 57,84 persen, hal ini disebabkan pada periode pelaporan selain adanya honor output kegiatan rutin juga terdapat honor output kegiatan Sensus Pertanian (ST2023), sedangkan pada periode pelaporan tahun sebelumnya terdapat honor kegiatan pendataan awal regsosek dan pendataan, Sensus Penduduk 2020 Lanjutan (LF-SP2020), yang mana jumlah petugasnya lebih banyak dibanding dengan petugas ST2023. Selain itu pada periode sebelumnya juga terdapat belanja barang non operasional-Penanganan Pandemi COVID-19;
3. Belanja barang persediaan naik sebesar 45,35 persen, dikarenakan pada periode pelaporan adanya kegiatan Sensus Pertanian 2023 (ST2023) dan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Regsosek;
4. Belanja jasa naik sebesar 77,72 persen, dikarenakan pada periode pelaporan selain belanja jasa telepon, air dan listrik, terdapat honor narasumber kegiatan FKP dan sosialisasi ST2023 serta adanya perubahan penganggaran untuk honor PPNPN yang semula menggunakan akun belanja keperluan perkantoran (521111) ke akun belanja jasa lainnya (522191) untuk triwulan IV 2023. Sedangkan pada periode pelaporan tahun sebelumnya belanja jasa ini sebagian besar berupa pemakaian belanja jasa telepon, air dan listrik;
5. Belanja pemeliharaan naik sebesar 49,92 persen, dikarenakan pada periode pelaporan belanja pemeliharaan tersebut berupa pemeliharaan gedung dan bangunan meliputi perbaikan kamar mandi dan instalasi pembuangan air, serta pemeliharaan peralatan dan mesin pemeliharaan kendaraan operasional, printer, PC (*Personal Computer*), UPS (*Uninterruptible Power Supply*), AC (*air conditioner*), refill APAR (*Alat Pemadam Api Ringan*) serta perbaikan meja kursi.
6. Belanja perjalanan dalam negeri mengalami penurunan sebesar 12,69 persen, dikarenakan pada periode pelaporan terdapat belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota untuk kegiatan FKP, pelatihan asisten fasilitator dan pelatihan ST2023 selain kegiatan rutin lainnya. Sedangkan

pada periode pelaporan tahun sebelumnya terdapat belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota untuk kegiatan pelatihan petugas SP2020 Lanjutan (LF-SP2020);

Pengembalian belanja sebesar Rp13.450.000,00 merupakan pengembalian belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota yang dikarenakan adanya peserta kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang tidak hadir pada pelaksanaan FKP. Pengembalian belanja tersebut disetor ke kas negara melalui:

1. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) sebesar Rp6.150.000,00 dengan NTB/NTP 230531728603 tanggal 31 Mei 2023 dengan NTPN 5D3298JM9RLHG6FB;
2. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) sebesar Rp7.300.000,00 dengan NTB/NTP 230626224861 tanggal 26 Juni 2023 dengan NTPN CAB6EQRA6JIF8DL;

Sedangkan pengembalian belanja barang pada periode pelaporan tahun sebelumnya sebesar sebesar Rp2.768.000,00 merupakan pengembalian belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota yang dikarenakan adanya petugas kegiatan yang mengundurkan diri.

Pada anggaran belanja barang, pada awalnya terdapat alokasi anggaran belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19. Alokasi belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 tersebut berjumlah Rp200.000,00 berupa Belanja Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19 (521241) yang melekat pada kegiatan Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (2900.BMA005). Anggaran tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi yang ada saat ini, sehingga anggaran tersebut direvisi ke dalam pos perjalanan dinas dalam kota. Rincian realiasi anggaran belanja dalam rangka COVID-19 tersaji dalam tabel berikut ini:

*Tabel 17
Laporan Realisasi Belanja Dalam Rangka Penanganan COVID-19
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023*

Kode	Uraian	Anggaran Semula (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)	Realiasi Belanja (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	% Realisasi
521241	Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19	200.000	0	0	0	0,00
Jumlah		200.000	0	0	0	0,00

Belanja
Modal
Rp37.200.000
,00

B.5. Belanja Modal

Realisasi belanja modal per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp37.200.000,00 dan Rp0,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Rincian perbandingan belanja modal sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 18
Perbandingan Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.200.000	0	0,00
Jumlah Bruto	37.200.000	0	0,00
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah	37.200.000	0	0,00

Realisasi Belanja Modal mengalami kenaikan pada 31 Desember 2023 dibandingkan 31 Desember 2022, yang disebabkan oleh adanya realisasi belanja peralatan dan mesin berupa pengadaan meubelair yang mana, pengadaan tersebut diperlukan mengingat meubelair sebelumnya telah usang/perlu baikan serta menyesuaikan dengan kondisi ruangan yang ada.

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp37.200.000,00 dan Rp0,00. Rincian perbandingan belanja modal peralatan dan mesin sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 19
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.200.000	0	0,00
Jumlah Bruto	37.200.000	0	0,00
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah	37.200.000	0	0,00

Sampai dengan 31 Desember 2023 realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp37.200.000,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp37.500.000,00 berupa pengadaan meubelair dengan rekanan CV. Angle yang beralamat di Jl. Kaliurang Km.10,2 Gondangan, Sardoharjo, Ngaglik, Sleman sesuai kontrak nomor:B-006/3371/PPK.MBL/06/2023 tanggal 13 Juni 2023.

Pengadaan meubelair sebesar Rp37.200.000,00 tersebut berupa pengadaan meubelair baik untuk ruang kepala dan ruang tamu dengan rincian sebagai berikut:

1. Meja kerja kayu (meja kerja pimpinan) sebanyak 1 unit seharga Rp7.797.000,00;
2. Meja kerja kayu sebanyak 1 unit seharga Rp4.476.000,00;
3. Kursi besi metal (kursi pimpinan) sebanyak 1 unit seharga Rp2.690.000,00;
4. Kursi besi metal (kursi hadap pegawai) sebanyak 2 unit dengan jumlah harga Rp4.464.000,00;
5. Sice/Sofa sebanyak 1 unit dengan jumlah harga Rp8.600.000,00 yang berupa meja tamu, meja sudut dan sofa tamu;
6. Sice/Sofa Ruang Tamu sebanyak 1 unit dengan jumlah harga Rp9.173.000,00 yang berupa meja tamu dan sofa tamu.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Belanja
Dibayar di
Muka
Rp483.880,00

C.1. Belanja Dibayar di Muka

Saldo belanja dibayar di muka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp483.880,00 dan Rp264.658,00. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian belanja dibayar di muka adalah sebagai berikut:

Tabel 20
Rincian Belanja Dibayar Dimuka
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Jenis	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (Prepaid)	483.880	264.658
Jumlah	483.880	264.658

Belanja barang yang dibayar dimuka pada periode pelaporan sebesar Rp483.880,00 merupakan belanja dibayar dimuka untuk langganan *google drive* selama 322 hari, yang mana belanja tersebut dihitung sejak 18 November 2023 dan jatuh tempo pada tanggal 17 November 2024. Belanja dibayar dimuka tersebut berupa pembelian voucher *google play* untuk langganan *google drive* dengan kuota sebesar 200GB untuk memperlancar kegiatan perkantoran terutama digunakan untuk penyimpanan data/arsip *soft file* yang mana pada periode sebelumnya sebesar 100GB. Peningkatan kapasitas kuota *google drive* ini diperlukan mengingat pentingnya penyimpanan/pengarsipan dokumentasi kegiatan maupun administrasi dalam bentuk *softcopy*.

Persediaan
Rp22.932.139
,00

C.2. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp22.932.135,00 dan Rp Rp39.504.045,00. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 21
Rincian Persediaan Sampai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Jenis	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Barang Konsumsi	22.932.139	39.504.045
Jumlah	22.932.139	39.504.045

Mutasi Persediaan selama periode 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	39.504.045
<i>Mutasi Tambah:</i>	
- Pembelian	116.177.000
- Transfer Masuk	27.459.017
- Perolehan Lainnya	960.000
- Hasil Opname Fisik	95.220
Total Mutasi Tambah:	144.691.237
<i>Mutasi Kurang:</i>	
- Habis Pakai	(157.994.348)
- Usang	(3.173.575)
- Reklasifikasi Keluar	(95.220)
Total Mutasi Kurang:	(161.263.143)
Kenaikan (Penurunan)	(16.571.906)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	22.932.139

Berdasarkan mutasi nilai persediaan, mutasi tambah persediaan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp144.691.237,00 terdiri dari :

1. Pembelian barang persediaan sebesar Rp116.177.000,00 yang merupakan barang konsumsi.
2. Transfer masuk online barang konsumsi dari BPS Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2023 sebesar Rp27.459.017,00 dengan rincian :
 - a. Instrumen Sakernas 2023 sesuai BAST Nomor B-009.30/33510/PL.613/01/2023 tanggal 13 Januari 2023 sebesar Rp985.650,00;
 - b. Dokumen Survei Harga Produsen 2023 sesuai BAST Nomor B-001.30/33510/PL.613/01/2023 tanggal 31 Januari 2023 sebesar Rp290.400;
 - c. Dokumen Seruti 2023 sesuai BAST B-022.29/33510/PL.613/02/2023 tanggal 2 Februari 2023 sebesar Rp279.276,00;
 - d. Perlengkapan Statistik Produksi sesuai BAST Nomor B-023.30/33510/PL.613/02/2023 tanggal 7 Februari 2023 sebesar Rp1.540.000,00;

- e. Instrumen Susenas Maret 2023 sesuai BAST Nomor B-021.41/BAST/33510/PL.613/2023 tanggal 7 Februari 2023 sebesar Rp6.759.817,00;
- f. Dokumen Survei Disagregasi PMTB 2023 sesuai BAST Nomor : B-024.30/33510/PL.613/02/2022 tanggal 14 Februari 2023 sebesar Rp117.300,00;
- g. Dokumen Survei E-Commerce 2023 sesuai BAST Nomor : B-025.65/33510/PL.613/02/2023 tanggal 21 Februari 2023 sebesar Rp466.500,00;
- h. Dokumen Updating Direktori Penyedia Jasa Pariwisata 2023 sesuai BAST Nomor : B-025.65/33510/PL.613/02/2023 tanggal 23 Februari 2023 sebesar Rp26.750,00;
- i. Dokumen Pencacahan dan Pemeriksaan SPDT IHPB 2023 sesuai BAST Nomor : B-026.30/33510/PL.613/03/2023 tanggal 27 Maret 2023 sebesar Rp109.580,00;
- j. Dokumen Survei SKLNPT sesuai BAST Nomor : B-028.30/33510/PL.613/03/2023 tanggal 30 Maret 2023 sebesar Rp44.800,00;
- k. Dokumen Survei VIMK Trw 2023 sesuai BAST Nomor : B-026.30/33510/PL.613/03/2023 tanggal 30 Maret 2023 sebesar Rp11.454,00;
- l. Dokumen Survei IBS 2023 sesuai BAST Nomor : B-027.30/33510/PL.613/03/2023 tanggal 30 Maret 2023 sebesar Rp185.703,00;
- m. Dokumen Survei PDN/POLDIS 2023 sesuai BAST Nomor : B-029.30/33510/PL.613/03/2023 tanggal 30 Maret 2023 sebesar Rp270.453,00;
- n. Dokumen Survei Konstruksi 2023 sesuai BAST Nomor : B-030.30/33510/PL.613/03/2023 tanggal 30 Maret 2023 sebesar Rp58.303,00;
- o. Dokumen Survei Terintegrasi Statistik PDN 2023 sesuai BAST Nomor : B-031.30/33510/PL.613/03/2023 tanggal 30 Maret 2023 sebesar Rp192.988,00;
- p. Dokumen Survei Keuangan 2023 sesuai BAST Nomor : B-032.30/33510/PL.613/03/2023 tanggal 30 Maret 2023 sebesar Rp22.016,00;

- q. Dokumen Survei Pertambangan Energi 2023 sesuai BAST Nomor : B-033.30/33510/PL.613/03/2023 tanggal 30 Maret 2023 sebesar Rp47.529,00;
- r. Instrumen FKP Pendataan Awal Regsosek 2023 sesuai BAST Nomor : B-045.30/33510/PL.613/04/2023 tanggal 12 April 2023 sebesar Rp477.090,00;
- s. Balpoint Peserta FKP 2023 sesuai BAST Nomor : B-050.30/33510/PL.613/04/2023 tanggal 17 April 2023 sebesar Rp1.577.125,00;
- t. Dokumen VHTL, VREST-UMB dan VDTW 2023 sesuai BAST Nomor : B-051.30/33510/PL.613/04/2023 tanggal 18 April 2023 sebesar Rp276.140,00;
- u. Kuesioner Seruti Triwulan 2 dan 4 2023 sesuai BAST Nomor : B-085.65/33510/PL.613/06/2023 tanggal 5 Juni 2023 sebesar Rp1.815.030,00;
- v. Buku Pedoman dan kuesioner Pencacahan SKSPPI 2023 sesuai BAST Nomor : B-085.65/33510/PL.613/06/2023 tanggal 5 Juni 2023 sebesar Rp107.179,00;
- w. Dokumen SKLNP, NTA, SKPS 2023 sesuai BAST Nomor : B-121.30/33510/PL.613/06/2023 tanggal 27 Juni 2023 sebesar Rp72.137,00;
- x. Dokumen Survei Keuangan Tahap II Tahun 2023 sesuai BAST Nomor : B-121.65/33510/PL.613/06/2023 tanggal 27 Juni 2023 sebesar Rp34.906,00;
- y. Dokumen Survei Kehutanan 2023 sesuai BAST Nomor : B-122.26/33510/PL.613/06/2023 tanggal 27 Juni 2023 sebesar Rp3.183,00;
- z. Dokumen Survei Pertambangan Tahap II 2023 sesuai BAST Nomor : B-123.30/33510/PL.613/06/2023 tanggal 27 Juni 2023 sebesar Rp4.728,00;
- aa. Survei Konstruksi Tahap II 2023 sesuai BAST Nomor : B-123.65/33510/PL.613/06/2023 tanggal 27 Juni 2023 sebesar Rp91.341,00;
- bb. Dokumen Survei Keuangan Tahap III 2023 sesuai BAST Nomor : B-137.30/33510/PL.613/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 sebesar Rp45.636,00;

- cc. Survei VIMK Tahunan 2023 sesuai BAST Nomor : B-146.30/33510/PL613/07/2023 tanggal 31 Agustus 2023 sebesar Rp388.400,00;
 - dd. Kegiatan PLKUMKM sesuai BAST Nomor : B-155/33510/PL613/09/2023 tanggal 26 September 2023 sebesar Rp2.485.200,00;
 - ee. Dokumen SHP sesuai BAST Nomor : B-184.30/33510/PL613/12/2023 tanggal 4 Desember 2023 sebesar Rp602.900,00
 - ff. Dokumen Susenas Maret 2024 sesuai BAST Nomor : B-201.30/33510/PL613/12/2023 tanggal 20 Desember 2023 sebesar Rp4.300.380,00;
 - gg. Dokumen Survei Kehutanan sesuai BAST Nomor : B-203.14/33510/PL613/12/2023 tanggal 20 Desember 2023 sebesar Rp22.600,00;
 - hh. Dokumen Survei Ubinan sesuai BAST Nomor : B-205.30/33510/PL613/12/2023 tanggal 20 Desember 2023 sebesar Rp146.340,00;
 - ii. Buku KBLI sesuai BAST Nomor : B-207.30/33510/PL613/12/2023 tanggal 20 Desember 2023 sebesar Rp161.844,00.
3. Perolehan Lainnya sebesar Rp960.000,00 yang merupakan pengadaan publikasi sebanyak 3 buku/Rp960.000,00 dengan Kuitansi Nomor 00370 dengan akun belanja 521111 (belanja bahan). Pengadaan barang tersebut dilakukan ralat SPM ke akun 521811 (belanja barang persediaan) sesuai surat B-207/02500/PL.530/02/2023 tanggal 3 Februari 2023. Barang tersebut dilakukan perekaman melalui perolehan lainnya karena belum dilakukan pencatatan BAST Modul Komitmen SAKTI;
4. Reklasifikasi Masuk berdasarkan surat kepala BPS Kota Magelang Nomor Nomor : B-272/3371/PL.610/03/2023 tanggal 30 Maret 2023 sebesar Rp95.220,00 yang berupa Kuesioner Uji Coba S. Terintegrasi PDN 2023 sebanyak 46 set.

Sedangkan mutasi kurang persediaan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp161.263.143,00 terdiri dari :

- 1. Pemakaian barang habis pakai sebesar Rp157.994.348,00 yang berupa:
 - a. Pemakaian barang habis pakai untuk operasional perkantoran/kegiatan survei serta pemakaian habis pakai yang berupa instrumen

- survei/kegiatan dengan tahun perolehan 2023 sebesar Rp136.065.348,00;
- b. Pemakaian barang habis pakai yang merupakan instrument dan publisitas Sensus Pertanian 2023 dengan tahun perolehan 2022 sebesar 21.730.310,00;
 - c. Pemakaian barang habis pakai berupa dokumen/kuesioner instrument Survei Tanaman Pangan/Ubinan dengan tahun perolehan 2022 sebesar Rp198.690,00;
2. Reklasifikasi keluar berdasarkan surat kepala BPS Kota Magelang Nomor Nomor : B-272/3371/PL.610/03/2023 tanggal 30 Maret 2023 sebesar Rp95.220,00 yang berupa Surat Pengantar BPS 2023 sebanyak 46 set Survei Kontruksi yang diselanjutnya dilakukan reklasifikasi masuk ke Kuesioner Uji Coba S. Terintegrasi PDN 2023 sebanyak 46 set;
 3. Barang usang berdasarkan surat Kepala BPS Kota B-498/33710/PL.810/07/2023 tanggal 5 Juli 2023 sebanyak 4.594 set/Rp3.173.575,00.

Berdasarkan surat Kepala BPS Kota Magelang nomor B-501/33710/PL.810/07/2023 tanggal 5 Juli 2023 BPS Kota Magelang mengajukan usulan permohonan persetujuan barang persediaan sisa survey/sensus dengan kondisi rusak dan usang sebanyak 4.967 set/Rp3.276.150,00 dan telah terbit surat persetujuan pemusnahan persediaan nomor B-1278/02500/PL.810/09/2023 tanggal 21 September 2023 perihal Persetujuan Pemusnahan Persediaan Rusak/Usang pada Badan Pusat Staitsik (BPS) Satker Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Tindak lanjut atas persetujuan pemusnahan tersebut telah dilakukan pemusnahan dokumen dengan nomor Berita Acara Pemusnahan Nomor B-770/33710/PL.810/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023. Sampai dengan akhir periode pelaporan BPS Kota Magelang telah mengajukan usulan Surat Keputusan Penghapusan ke BPS RI dengan nomor surat B-770/33710/PL.810/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023.

Tanah
Rp3.068.112.
000,00

C.3. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.068.112.000,00 dan Rp3.068.112.000,00. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022		3.068.112.000
<i>Mutasi Tambah:</i>		
Total Mutasi Tambah:	_____	+
<i>Mutasi Kurang:</i>		
Total Mutasi Kurang:	_____	- -
Kenaikan (Penurunan)	_____	-
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023		3.068.112.000

Rincian Saldo Tanah tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 22
Rincian Saldo Tanah Sampai 31 Desember 2023

No.	Kode Barang. KIB	Luas (m2)	Nilai
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I	212	Rp680.880.000,00
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	300	Rp2.387.232.000,00
Jumlah		512	Rp3.068.112.000,00

Tanah yang dikuasai BPS Kota Magelang berupa:

1. Tanah untuk bangunan gedung kantor seluas 300 m² terletak di Jl. Gatot Subroto No. 54 D dengan sertifikat hak pakai nomor 4;
2. Tanah untuk bangunan rumah dinas/bangunan rumah negara seluas 212 m² terletak di Jl. Sunan Kalijaga II/28 dengan sertifikat hak pakai nomor 5.

Kedua tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pusat Statistik. Aset tanah yang dikuasai telah diajukan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara dan telah mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan Nomor 06/KM.6/WKN.09/KNL.01/2011 tanggal 08 November 2011.

Peralatan dan Mesin
Rp2.011.631.272,00

C.4. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.011.631.272,00 dan Rp1.889.986.499,00.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	1.889.986.499
<i>Mutasi Tambah:</i>	
- Pembelian	37.200.000
- Transfer Masuk	396.880.000
Total Mutasi Tambah:	434.080.000 +
<i>Mutasi Kurang:</i>	
- Transfer Keluar	(55.500.000)
- Penghentian Aset dari Penggunaan	(256.935.227)
Total Mutasi Kurang:	(312.435.227)
Kenaikan (Penurunan)	121.644.773
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	2.011.631.272
Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2023	(1.494.904.748)
Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2023	516.726.524

Berdasarkan mutasi nilai peralatan dan mesin, mutasi tambah peralatan dan mesin sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp434.080.000,00 berupa:

1. Pembelian 7 unit/Rp37.200.000,00 sesuai BAST Nomor B-009/3371/PPK.MBL/07/20223 tanggal 3 September 2023, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Lemari kayu sebanyak 1 buah/Rp4.476.000,00;
 - b. Meja Kerja Kayu sebanyak 1 buah/Rp7.797.000,00;
 - c. Kursi Besi/metal sebanyak 3 buah/Rp7.154.000;
 - d. Sice sebanyak 2 buah/Rp17.773.000,00.
2. Transfer masuk sebesar Rp396.880.000,00 yang terdiri dari:
 - a. Transfer masuk alat angkutan berupa sepeda motor merk Honda Verza sebanyak 1 unit/Rp20.200.000,00 dari BPS Temanggung sesuai BAST Nomor B-587.1/33230/PL.613/10/2023 tanggal 2 Oktober 2023;
 - b. P.C Unit merk Acer Veriton M 17 sebanyak 12 unit/Rp336.000.000,00 dari BPS Provinsi Jawa Tengah sesuai BAST Nomor B-191.30/33510/PL.613/12/2023 tanggal 11 Desember 2023;
 - c. Scanner (Peralatan Personal Komputer) merk Epson Workforce DS-970 A4 Duplex Sheet Fed Documen Scanner sebanyak 1 unit/Rp21.000.000,00 dari BPS Provinsi Jawa Tengah sesuai BAST Nomor B-200.30/33510/PL.613/12/2023 tanggal 20 Desember 2023;
 - d. Uninterruptable *Power Suplly* (UPS) merk ICA Line Interactive UPS CP1400 (1400VA_700W) sebanyak 12 unit/Rp19.680.000,00 dari BPS Provinsi Jawa Tengah sesuai BAST Nomor B-181.30/33510/PL.613/11/2023 tanggal 21 November 2023.

Sedangkan mutasi kurang peralatan dan mesin sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp312.435.227,00 berupa:

1. Transfer keluar sebesar Rp55.500.000 dari BPS Kota Magelang ke BPS kabupaten Kota Lainnya, dengan rincian:
 - a. BPS Kebumen sebanyak 1 unit sepeda motor merk Honda New Vario 110 CBS/D1AO2N19M1 A/T senilai Rp17.900.000,00 sesuai BAST Nomor B-726.1/33710/PL.613/10/2023 tanggal 2 Oktober 2023;
 - b. BPS Purworejo sebanyak 1 unit sepeda motor merk Honda New Vario 110 CBS/D1AO2N19M1 A/T senilai Rp17.900.000,00 sesuai BAST Nomor B-726.2/33710/PL.613/10/2023 tanggal 2 Oktober 2023;
 - c. BPS Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1 unit sepeda motor merk Honda New Vario 125 CBS/A1FO2N36M1 A/T senilai Rp19.700.000,00 sesuai BAST Nomor B-726.3/33710/PL.613/10/2023 tanggal 2 Oktober 2023;
2. Penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp256.935.227,00 yang terdiri dari:
 - a. Penghentian Aset sebanyak 9 unit/Rp143.893.900,00 sepeda motor berdasarkan surat pernyataan kepala BPS Kota Magelang nomor B-673/33710/PL.520/09/2023 tanggal 14 September 2023;
 - b. Alat Kantor dan rumah Tangga sebanyak 10 buah/Rp24.603.561,00 berdasarkan surat pernyataan Kepala BPS Kota Magelang nomor B-780/33710/PL.520/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023;
 - c. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebanyak 1 buah/Rp1.672.000,00 berdasarkan surat pernyataan Kepala BPS Kota Magelang nomor B-780/33710/PL.520/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023;
 - d. Peralatan Komputer sebanyak 9 buah/Rp86.765.766,00 berdasarkan surat pernyataan Kepala BPS Kota Magelang nomor B-780/33710/PL.520/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023.

Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp1.494.904.748,00) sehingga nilai buku peralatan dan mesin sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp516.726.524,00.

Gedung dan
Bangunan
Rp1.015.915.
000,00

C.5. Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp1.015.915.000,00 dan Rp1.015.915.000,00. Gedung dan bangunan senilai Rp1.015.925.000,00 terdiri dari bangunan dan gedung kantor beserta instalasi lainnya dan pagar permanen yang terletak di Jl. Gatot Subroto

No. 54 D, dan rumah dinas negara golongan I C yang terletak di Jl. Sunan Kalijaga II/28. Mutasi nilai gedung dan bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	1.015.915.000
<i>Mutasi Tambah:</i>	
Total Mutasi Tambah:	_____ +
<i>Mutasi Kurang:</i>	
Total Mutasi Kurang:	_____ - -
Kenaikan (Penurunan)	_____ -
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	1.015.915.000
Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2023	(154.218.075)
Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2023	861.696.925

Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp154.218.075,00) sehingga nilai buku gedung dan bangunan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp861.696.925,00.

Aset Tetap
Lainnya
Rp56.426.
954,00

C.6. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp56.426.954,00 dan Rp56.426.954,00. Aset tetap lainnya tersebut berupa bahan perpustakaan tercetak/serial lainnya.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	56.426.954
<i>Mutasi Tambah:</i>	
Total Mutasi Tambah:	_____ +
<i>Mutasi Kurang:</i>	
Total Mutasi Kurang:	_____ - -
Kenaikan (Penurunan)	_____ -
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	56.426.954
Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2023	-
Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2023	56.426.954

Akumulasi
Penyusutan
Aset
Tetap
Rp1.649.
122.823,00

C.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp1.649.122.823,00 dan Rp1.733.646.721,00 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset

yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 23
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2023

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	2.011.631.272	1.494.904.748	516.726.524
Gedung dan Bangunan	1.015.915.000	154.218.075	861.696.925
Aset Tetap Lainnya	56.426.954	0	56.426.954
Jumlah	3.083.973.226	1.649.122.823	1.434.850.403

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp84.523.898,00 jika dibandingkan dengan akumulasi penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022. Penurunan ini terjadi karena adanya penghentian aset dari penggunaan peralatan dan mesin berupa sepeda motor sebanyak 9 unit, alat kantor dan rumah tangga sebanyak 10 unit, alat komunikasi dan pemancar sebanyak 1 buah dan peralatan computer sebanyak 9 buah. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tak Berwujud
Rp36.425.000,00

C.8. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp36.425.000,00 dan Rp36.425.000,00. Aset tak berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset tak berwujud pada BPS Kota Magelang berupa *Software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 24
Rincian Aset Tak Berwujud 31 Desember 2023

Uraian	Nilai Perolehan
Software	36.425.000
Jumlah	36.425.000

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	36.425.000
<i>Mutasi Tambah:</i>	
Transfer Masuk	- +
Total Mutasi Tambah:	-
<i>Mutasi Kurang:</i>	
Total Mutasi Kurang:	- -
Kenaikan (Penurunan)	-
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	36.425.000
Akumulasi Amortisasi s/d 31 Desember 2023	(27.584.375)
Nilai Buku Sampai dengan 31 Desember 2023	8.840.625

Akumulasi amortisasi aset tak berwujud sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp27.584.375,00) sehingga nilai aset berwujud sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp8.840.625,00.

Rincian Aset tak berwujud yang dikuasai oleh BPS Kota Magelang per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 25
Rincian Jenis Aset Tak Berwujud 31 Desember 2023

No	Merk/Type	NUP	Harga Perolehan Per Unit	Total Perolehan (Rp)
1.	Microsoft Officeproplus 2019 OLP NL Gov	27-28	6.425.000	12.850.000
2.	Mcfée-MVISION EDR & EPP 1-1 Biz	29-33	1.815.000	9.075.000
3.	Microsoft Office 365 E1 Gov	34-38	2.900.000	14.500.000
Jumlah				36.425.000

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp27.584.375,00

C.9. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp27.584.375,00 dan Rp20.084.375,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp4.553.125,00 jika dibandingkan dengan akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya per 31 Desember 2022. Kenaikan ini merupakan penyusutan dan amortisasi aset lainnya sampai dengan 31 Desember 2023.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 26
Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Software	36.425.000	27.584.375	8.840.625
Jumlah	36.425.000	27.584.375	8.840.625

Amortisasi aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas aset tak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Utang
Kepada
Pihak Ketiga
Rp112.745.
668,00

C.10. Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp112.745.668,00 dan Rp122.763.648,00 Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Rincian Utang Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 27
Rincian Utang Pada Pihak Ketiga 2023 dan 2022

Jenis	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	106.212.935	116.610.341
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	6.532.733	6.153.307
Jumlah	112.745.668	122.763.648

Kewajiban utang pihak ketiga per 31 Desember 2023 sebesar Rp112.745.668,00 terdiri dari:

1. Belanja Pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp106.212.935,00 berupa belanja tunjangan khusus/kinerja bulan Desember 2023.
2. Belanja Barang yang masih harus dibayar sebesar Rp6.532.733,00 berupa:
 - a. Beban keperluan perkantoran berupa langganan koneksi internet bulan Desember 2023 sebesar Rp1.043.400,00;
 - b. Beban langganan listrik bulan Desember 2023 sebesar Rp5.185.069,00;
 - c. Beban langganan telepon bulan Desember 2023 sebesar Rp35.514,00;

d. Beban langganan air bulan Desember 2023 sebesar Rp268.750,00;

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 sebesar Rp122.763.648,00 telah dilakukan pelunasan pada bulan Januari 2023 sebagaimana terlampir pada lampiran bukti pendukung jurnal balik per Januari 2023.

Ekuitas
Rp4.422.473.
379,00

C.11. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.422.473.379,00 dan Rp4.230.139.412,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Nilai ekuitas menggambarkan kekayaan yang dimiliki BPS Kota Magelang pada akhir periode pelaporan yaitu 31 Desember 2023. Nilai ekuitas mengalami kenaikan sebesar Rp192.333.967,00 atau 4,55 persen dibandingkan periode pelaporan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh penurunan pada pos-pos pembentuk transaksi antar entitas yaitu pos Ditagihkan ke entitas lain (DKEL), Diterima dari entitas lain (DDEL) dan pos transfer masuk . Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan
PNBP
Rp
2.232.890,00

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.232.890,00 dan Rp2.142.032,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 28
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Naik(Turun) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.232.890	964.032	131,62
Pendapatan Denda Lainnya	0	1.178.000	(100,00)
Jumlah	2.232.890	2.142.032	4,24

Tabel 29
Perbandingan Nilai LO dan LRA Pendapatan Negara Bukan Pajak
Sampai 31 Desember 2023

Uraian	Nilai LO (Rp)	Nilai LRA (Rp)	Selisih
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.232.890	2.232.890	0
Pendapatan Denda Lainnya	0	0	0
Jumlah	2.232.890	2.232.890	0

Dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan sebesar 4,24 persen. Kenaikan ini terjadi adanya kenaikan tarif sewa rumah dinas terhitung mulai 1 Januari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Nomor. 019/XII/33/Tahun 2022 tanggal 19 Desember 2022 yang semula sebesar Rp80.336,00 menjadi Rp202.990,00. Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan diperoleh dari sewa rumah dinas Badan Pusat Statistik Kota Magelang selama selama 8 bulan yaitu Januari, Februari, dan April s.d. September 2023. Untuk bulan Maret 2023 tidak terdapat pendapatan sewa rumah dinas dikarenakan pejabat yang menghuni rumah dinas tersebut purna tugas mulai tanggal 1 Maret 2023 sedangkan pejabat yang baru berdasarkan Surat Keputusan Pindah per 1 April 2023. Selisih nilai LO dan LRA sebesar

Rp202.990,00 merupakan pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan bulan Oktober 2023 yang mana pengakuan pendapatan dan beban dilakukan pada saat pengajuan pencairan realisasi belanja.

Beban
Pegawai
Rp3.299.944.
210,00

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.299.944.210,00 dan Rp3.559.794.665,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 30
Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Naik (Turun)%
Beban Gaji Pokok PNS	1.223.655.900	1.286.515.000	(4,89)
Beban Pembulatan Gaji PNS	13.976	15.493	(9,79)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	72.296.550	81.700.970	(11,51)
Beban Tunj. Anak PNS	24.104.516	27.067.866	(10,95)
Beban Tunj. Struktural PNS	23.940.000	25.200.000	(5,00)
Beban Tunj. Fungsional PNS	184.500.000	254.175.000	(27,41)
Beban Tunj. PPH PNS	9.043.439	13.717.565	(34,07)
Beban Tunj. Beras PNS	58.153.260	64.743.480	(10,18)
Beban Uang Makan PNS	156.995.000	190.218.000	(17,47)
Beban Tunjangan Umum PNS	10.660.000	15.155.000	(29,66)
Beban Uang Lembur	39.820.000	11.049.000	260,39
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1.496.761.569	1.590.237.291	(5,88)
Jumlah	3.299.944.210	3.559.794.665	(7,30)

Berdasarkan tabel rincian beban pegawai, jumlah beban pegawai sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 7,30 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya dikarenakan oleh:

1. Beban gaji pokok dan pembulatan gaji PNS mengalami penurunan masing-masing sebesar 4,89 persen dan 9,79 persen dikarenakan adanya mutasi

keluar/purna tugas pegawai sebanyak 4 pegawai dan mutasi masuk sebanyak 2 pegawai, yang mana sebagian besar jabatan pegawai yang mutasi keluar lebih tinggi dibanding dengan mutasi masuk;

2. Beban tunjangan suami/istri, anak, pph dan beras PNS mengalami penurunan masing-masing sebesar 11,51 persen, 10,95 persen, 34,07 persen dan 10,18 persen dikarenakan berkurangnya jumlah tanggungan keluarga karena adanya mutasi pegawai, tanggungan yang lulus kuliah ataupun adanya pegawai yang memasuki purna tugas;
3. Beban tunjangan struktural PNS mengalami penurunan 5,00 persen atau sebesar Rp1.260.000,00 berupa tunjangan jabatan administrator untuk eselon III. Hal ini terjadi dikarenakan pejabat administrator yang lama memasuki purna tugas per 1 Maret 2023 sedangkan untuk pejabat administrator yang baru per 1 April 2023, sehingga terdapat 1 bulan tunjangan jabatan yang tidak terserap;
4. Beban tunjangan fungsional PNS mengalami penurunan masing-masing sebesar 27,41 persen. Hal ini dikarenakan adanya realisasi belanja tunjangan fungsional sebagai tindak lanjut dari penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional tertentu sebanyak 5 pegawai. Selain itu dengan adanya mutasi keluar sebanyak 2 pegawai fungsional tertentu pada periode pelaporan maka berdampak terhadap realisasi belanja tunjangan fungsional;
5. Beban uang makan PNS mengalami penurunan sebesar 17,47 persen dikarenakan pada periode pelaporan terdapat banyak kegiatan yang dilakukan diluar kantor seperti pelatihan, rakor dan konsultasi;
6. Beban uang tunjangan umum PNS mengalami penurunan sebesar 29,66 persen dikarenakan pada periode pelaporan terdapat mutasi keluar pegawai dengan jabatan fungsional umum/pelaksana sebanyak 1 pegawai;
7. Beban uang lembur mengalami kenaikan sebesar 260,39 persen dikarenakan pada periode pelaporan selain pencairan lembur untuk kegiatan penyelesaian kelengkapan administrasi kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP), perbaikan data anomaly ST2023 PL-KUMKM serta adanya kegiatan pengolahan data pendataan awal Regsosek yang mana supervisor pengolahan dari pegawai organik;
8. Beban pegawai (tunjangan khusus/kegiatan) mengalami penurunan sebesar 5,88 persen dikarenakan adanya mutasi keluar/purna tugas pegawai sebanyak 4 pegawai sedangkan mutasi masuk hanya 2 pegawai selama periode pelaporan.

Berdasarkan tabel perbandingan nilai LO dan LRA dibawah beban pegawai sampai dengan 31 Desember 2023, terdapat rincian beban yang tidak sama atau selisih antara nilai LO dan nilai LRA sebesar Rp10.397.406,00. Selisih tersebut merupakan selisih belanja tunjangan khusus/kegiatan bulan Desember 2022 yang dibayarkan pada bulan Januari 2023 sebesar Rp116.610.341,00 dengan belanja tunjangan khusus/kegiatan bulan Desember 2023 yang dibayarkan pada bulan Januari 2024 sebesar Rp106.212.935,00.

Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pegawai Sampai 31 Desember 2023 tersaji pada tabel berikut:

*Tabel 31
Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pegawai
Sampai 31 Desember 2023*

Uraian	Nilai LO (Rp)	Nilai LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Gaji Pokok PNS	1.223.655.900	1.223.655.900	0
Beban Pembulatan Gaji PNS	13.976	13.976	0
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	72.296.550	72.296.550	0
Beban Tunj. Anak PNS	24.104.516	24.104.516	0
Beban Tunj. Struktural PNS	23.940.000	23.940.000	0
Beban Tunj. Fungsional PNS	184.500.000	184.500.000	0
Beban Tunj. PPh PNS	9.043.439	9.043.439	0
Beban Tunj. Beras PNS	58.153.260	58.153.260	0
Beban Uang Makan PNS	156.995.000	156.995.000	0
Beban Tunjangan Umum PNS	10.660.000	10.660.000	0
Beban Uang Lembur	39.820.000	39.820.000	0
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1.496.761.569	1.507.158.975	(10.397.406)
Jumlah	3.299.944.210	3.310.341.616	(10.397.406)

*Beban
Persediaan
Rp157.994.
348,00*

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan sampai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp157.994.348,00 dan Rp95.918.028,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 32
Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Naik (Turun)%
Beban Persediaan konsumsi	157.994.348	95.918.028	64,72
Jumlah	157.994.348	95.918.028	64,72

Realisasi beban persediaan sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 64,72 persen dibandingkan dengan periode pelaporan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan pada periode pelaporan terdapat pemakaian barang habis pakai berupa ATK, *computer supplies* dan instrumen kelengkapan untuk kegiatan besar seperti Susenas, Sakernas, Regsosek dan Sensus Pertanian 2023(ST2023). Selain terdapat pula pemakaian barang habis pakai dari persediaan tahun lalu sebesar Rp20.366.620,00 untuk kegiatan Sensus Pertanian 2023 (ST2023), sedangkan untuk kegiatan survei tanaman pangan dan ubinan Rp198.690,00.

Beban
Barang dan
Jasa
Rp1.211.306.395,00

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.211.306.395,00 dan Rp2.310.676.808,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya beban barang dan jasa mengalami penurunan sebesar 47,58 persen. Penurunan beban barang dan jasa secara rinci sebagai berikut:

1. Beban keperluan perkantoran mengalami penurunan sebesar 12,13 persen dikarenakan pada periode pelaporan terjadi perubahan pembebanan anggaran yang mana honor PPNPN untuk bulan Januari s.d September 2023 pada akun 521111 (Belanja Keperluan Perkantoran) dan mulai bulan Oktober s.d Desember 2023 pada akun 522191 (Belanja jasa Lainnya);
2. Beban pengiriman surat dinas pos pusat mengalami penurunan sebesar 5,93 persen dikarenakan kegiatan koordinasi, komunikasi lebih banyak dilakukan melalui email, *whatsapp group* dan media social lainnya;
3. Beban honor operasional satuan kerja mengalami kenaikan 11,19 persen dikarenakan sebagian besar rate honor pengelola anggaran pada periode pelaporan mengalami kenaikan;

4. Tidak terdapat realisasi beban barang operasional lainnya pada periode pelaporan sedangkan untuk periode pelaporan tahun sebelumnya berupa pengadaan pakaian seragam pegawai;
5. Tidak terdapat realisasi beban barang operasional penanganan pandemi-COVID-19 pada periode pelaporan sedangkan untuk periode pelaporan tahun sebelumnya berupa pembelian lisensi akun zoom meeting, pengadaan suplemen vitamin, tisu basah dan *handsanitizer*;
6. Beban bahan mengalami penurunan 21,32 persen dikarenakan pada periode pelaporan berupa belanja konsumsi peserta FKP, pelatihan petugas, evaluasi pertemuan petugas susenas dan ST2023, sedangkan sebelumnya berupa perlengkapan survei, rakor, pencetakan publikasi dan konsumsi pelatihan SP2020 Lanjutan.
7. Beban honor output kegiatan mengalami penurunan sebesar 61,32 persen disebabkan pada periode pelaporan hanya berupa honor petugas kegiatan survei susenas, sakernas, dan survei rutin, sedangkan pada periode pelaporan tahun sebelumnya terdapat honor petugas kegiatan SP2020 lanjutan;
8. Beban barang non operasional lainnya naik sebesar 53,69 persen dikarenakan selain biaya penggantian responden ubinan juga terdapat beban asuransi petugas FKP, petugas ST2023, beban roleplaying pelatihan serta sosialisasi ST2023 berupa iklan melalui radio. Sedangkan periode tahun sebelumnya hanya berupa biaya penggantian responden ubinan;
9. Tidak terdapat realisasi beban barang non operasional-Penanganan Pandemi COVID-19 pada periode pelaporan sedangkan pada periode pelaporan tahun sebelumnya beban ini berupa pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker, *handsanitizer* untuk petugas lapangan;
10. Tidak terdapat realisasi beban peralatan dan mesin-ekstrakomptabel pada periode pelaporan sedangkan pada periode pelaporan tahun sebelumnya berupa 2 buah kursi besi/metal, 5 buah kursi metal merk Chitose dan 1 buah Microphone/Wireless MIC dengan nilai total Rp4.967.500,00;
11. Beban langganan listrik mengalami kenaikan sebesar 24,00 persen dikarenakan pada periode pelaporan selain kegiatan rutin juga terdapat kegiatan besar seperti FKP dan Sensus Pertanian 2023 serta adanya kegiatan pengolahan pendataan awal Regsosek, ST2023, serta pengolahan kegiatan survei rutin lainnya yang dilaksanakan dikantor berimbas pada pemakaian listrik;

12. Beban langganan telepon mengalami penurunan sebesar 1,22 persen dikarenakan dengan adanya kegiatan besar seperti FKP dan Sensus Pertanian 2023 serta PL-KUMKM maka membutuhkan lebih banyak kegiatan koordinasi dan komunikasi maupun konsultasi dengan berbagai pihak terkait;
13. Beban langganan air mengalami kenaikan sebesar 74,04 persen dikarenakan dengan adanya 3 kegiatan besar yaitu FKP, ST2023 dan PL-KUMKM sehingga aktivitas pegawai maupun mitra dikantor lebih banyak dan berimbas terhadap pemakaian air di kantor;
14. Beban jasa profesi mengalami kenaikan sebesar 752,78 persen dikarenakan pada periode pelaporan terdapat honor narasumber sosialisasi kegiatan FKP dan ST2023;
15. Beban jasa lainnya mengalami kenaikan sebesar 273,42 persen dikarenakan adanya perubahan penganggaran terkait honor Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang mana selama 9 bulan pada akun belanja keperluan perkantoran (521111) dan 3 bulan pada akun belanja jasa lainnya (522191). Sedangkan pada periode pelaporan tahun sebelumnya merupakan beban asuransi petugas pendataan lapangan kegiatan SP2020 Lanjutan (LF-SP2020);
16. Beban jasa-penanganan pandemi COVID-19 pada periode pelaporan tahun sebelumnya berupa *rapid test* dalam rangka perjalanan dinas.

Berdasarkan tabel perbandingan nilai LO dan LRA beban barang dan jasa, terdapat beberapa rincian beban yang tidak sama atau selisih antara nilai LO dan nilai LRA. Rincian selisih antara nilai LO dan nilai LRA tersebut antara lain:

1. Beban keperluan perkantoran sebesar Rp163.722,00 merupakan selisih beban dari perhitungan beban keperluan perkantoran yang masih harus dibayar dengan selisih belanja dibayar dimuka.

Selisih beban keperluan perkantoran yang masih harus dibayar diperoleh dari beban langganan koneksi internet bulan Desember 2023 yang dibayar pada bulan Januari 2024 sebesar Rp1.043.400,00 dikurangi dengan belanja langganan koneksi internet bulan Desember 2022 yang dibayarkan pada bulan Januari 2023 sebesar Rp987.900,00; diperoleh nilai Rp55.500,00.

Sedangkan selisih belanja dibayar dimuka diperoleh dari beban langganan *google drive* bulan Desember 2023 yang dibayar pada bulan Januari 2024 sebesar Rp483.880,00 dikurangi dengan belanja langganan *google drive* bulan Desember 2022 yang dibayarkan pada bulan Januari 2023 sebesar

Rp264.658,00; diperoleh nilai Rp219.222,00. Sehingga selisih nilai beban keperluan perkantoran sebesar Rp163.722,00 diperoleh dari Rp55.500 dikurangi Rp219.222,00.

2. Beban langganan listrik sebesar Rp224.141,00 merupakan selisih belanja listrik bulan Desember 2023 yang dibayar pada bulan Januari 2024 sebesar Rp5.185.069,00 dikurangi dengan belanja listrik bulan Desember 2022 yang dibayarkan pada bulan Januari 2023 sebesar Rp4.960.928,00;
3. Beban langganan telepon sebesar (Rp7.565,00) merupakan selisih belanja telepon bulan Desember 2022 yang dibayar pada bulan Januari 2023 sebesar Rp35.514,00 dikurangi dengan belanja telepon bulan Desember 2022 yang dibayarkan pada bulan Januari 2023 sebesar Rp43.079,00;
4. Beban langganan air sebesar Rp107.350,00 merupakan selisih belanja air bulan Desember 2023 yang dibayar pada bulan Januari 2024 sebesar Rp266.750,00 dikurangi dengan belanja air bulan Desember 2022 yang dibayarkan pada bulan Januari 2023 sebesar Rp161.400,00.

Tabel perbandingan rincian beban barang dan jasa sampai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel berikut:

*Tabel 33
Rincian Beban Barang dan Jasa
sampai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Naik (Turun)%
Beban Keperluan Perkantoran	143.979.347	163.853.039	(12,13)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.108.791	1.178.634	(5,93)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	97.752.000	87.912.000	11,19
Beban Barang Operasional Lainnya	0	10.136.000	(100,00)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	3.540.018	(100,00)
Beban Bahan	134.057.600	170.376.628	(21,32)
Beban Honor Output Kegiatan	685.074.000	1.771.197.500	(61,32)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	15.718.067	10.227.426	53,69
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	22.659.050	(100,00)
Beban Peralatan dan Mesin-Ekstrakomptabel	0	4.967.500	(100,00)
Beban Langganan Listrik	58.426.960	47.120.000	24,00
Beban Langganan Telepon	522.031	528.473	(1,22)
Beban Langganan Air	4.912.600	2.822.700	74,04
Beban Jasa Profesi	30.700.000	3.600.000	752,78
Beban Jasa Lainnya	39.054.999	10.458.840	273,42
Beban Jasa-Penanganan Pandemi COVID-19	0	99.000	(100,00)
Jumlah	1.211.306.395	2.310.676.808	(47,58)

Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Barang dan Jasa Sampai 31 Desember 2023 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 34
Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Barang dan Jasa
Sampai 31 Desember 2023

Uraian	Nilai LO (Rp)	Nilai LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Keperluan Perkantoran	143.979.347	144.143.069	(163.722)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.108.791	1.108.791	0
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	97.752.000	97.752.000	0
Beban Barang Operasional Lainnya	0	0	0
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0
Beban Bahan	134.057.600	134.057.600	0
Beban Honor Output Kegiatan	685.074.000	685.074.000	0
Beban Barang Non Operasional Lainnya	15.718.067	15.718.067	0
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel	0	0	0
Beban Langganan Listrik	58.426.960	58.202.819	224.141
Beban Langganan Telepon	522.031	529.596	(7.565)
Beban Langganan Air	4.912.600	4.805.250	107.350
Beban Jasa Profesi	30.700.000	30.700.000	0
Beban Jasa Lainnya	39.054.999	39.054.999	0
Beban Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0
Jumlah	1.211.306.395	1.211.146.191	160.204)

Beban Pemeliharaan
Rp179.067.277,00

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Sampai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp179.067.277,00 dan Rp119.438.200,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Perbandingan realisasi beban pemeliharaan sampai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 35
Rincian Beban Pemeliharaan
sampai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Naik (Turun)%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	64.618.230	23.677.000	172,92
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	114.449.047	95.761.200	19,52
Jumlah	179.067.277	119.438.200	49,92

Beban pemeliharaan mengalami penurunan sebesar 49,92 persen dibandingkan dengan periode pelaporan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan :

1. Beban pemeliharaan gedung dan bangunan naik sebesar 172,92 persen. Pemeliharaan ini berupa perbaikan instalasi pembuangan air dan perbaikan kamar mandi. Sedangkan pada periode pelaporan tahun sebelumnya pemeliharaan ini berupa penggantian gembok, duplikat kunci, seal kaca dan perbaikan atap yang bocor dan plafon yang rusak;
2. Beban pemeliharaan peralatan dan mesin naik sebesar 19,52 persen. Pemeliharaan ini berupa belanja pemeliharaan kendaraan operasional, printer, UPS (*Uninterruptible Power Supply*), AC (*air conditioner*), genset serta perbaikan meja dan kursi. Sedangkan pada periode pelaporan tahun sebelumnya hanya berupa pemeliharaan kendaraan operasional, perawatan perangkat computer dan isi ulang Alat Pemadam Api Ringan (APAR);

Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pemeliharaan Sampai 31 Desember 2023 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 36
Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pemeliharaan
Sampai 31 Desember 2023

Uraian	Nilai LO (Rp)	Nilai LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	64.618.230	64.618.230	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	114.449.047	114.449.047	0
Jumlah	179.067.277	179.067.277	0

Beban pemeliharaan senilai Rp0 yang disajikan di Laporan Operasional berasal dari pemakaian persediaan untuk pemeliharaan yang diperoleh dari realisasi belanja persediaan barang pemeliharaan, sedangkan nilai LRA sebesar Rp0 pada akun Beban bahan persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan akuntansi

berbasis akrual tidak menimbulkan beban pemeliharaan pada Laporan Operasional.

Beban
Perjalanan
Dinas
Rp524.901.
690,00

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas sampai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp524.901.690,00 dan Rp615.031.500,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian beban perjalanan dinas sampai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 37
Rincian Perjalanan Dinas
sampai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Naik (Turun)%
Beban Perjalanan Biasa	80.517.145	35.073.500	129,57
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.950.000	7.650.000	121,57
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	351.288.000	371.942.000	(5,55)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	76.146.545	200.366.000	(62,00)
Jumlah	524.901.690	615.031.500	(14,65)

Beban perjalanan dinas sampai dengan 31 Desember 2023 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 14,65 persen dengan rincian sebagai berikut:

1. Beban perjalanan biasa naik sebesar 129,57 persen, berupa perjalanan dinas evaluasi penyelenggaraan statistik sectoral, workshop, rakorda dan konsultasi ke BPS Provinsi. Sedangkan pada periode pelaporan tahun sebelumnya berupa perjalanan rakorda dan konsultasi ke BPS Provinsi;
2. Beban perjalanan dinas dalam kota naik sebesar 121,57 persen dibandingkan periode pelaporan yang sama tahun sebelumnya dikarenakan selain berupa biaya responden role playing regsosek juga terdapat perjalanan dinas terkait data cleaning regsosek, pencacahan dan pemeriksaan UTL (ST2023);
3. Beban perjalanan dinas paket meeting dalam kota turun sebesar 5,55 persen, dikarenakan pada periode pelaporan terdapat beberapa kegiatan seperti pelatihan dan sosialisasi ST2023, perjalanan Tim FKP regsosek selain kegiatan rutin lainnya. Sedangkan pada periode pelaporan tahun sebelumnya berupa pemutakhiran kerangka geospasial dan muatan wilkerstat ST2023 dan Regsosek;

4. Beban perjalanan dinas paket meeting luar kota turun sebesar 62,00 persen dikarenakan pada periode pelaporan hanya berupa perjalanan dinas kegiatan konsultasi serentak PDRB dan evaluasi administrasi kegiatan regsosek. Sedangkan pada periode pelaporan tahun sebelumnya berupa perjalanan dinas pelatihan petugas kegiatan Sensus Penduduk 2020 Lanjutan (LF-SP2020).

Rincian perbandingan nilai LO dan LRA beban perjalanan dinas tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 38
Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Perjalanan Dinas
Sampai 31 Desember 2023

Uraian	Nilai LO (Rp)	Nilai LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Perjalanan Biasa	80.517.145	80.517.145	0
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.950.000	16.950.000	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	351.288.000	351.288.000	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	76.146.545	76.146.545	0
Jumlah	524.901.690	524.901.690	0

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp201.525.616,00

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi sampai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp201.525.616,00 dan Rp171.484.453,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian beban penyusutan dan amortisasi tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 39
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Sampai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Naik(Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	170.377.186	138.729.773	22,81
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	23.648.430	23.648.430	0,00
Beban Amortisasi Software	7.500.000	9.106.250	(17,64)
Jumlah	201.525.616	171.484.453	17,52

Berdasarkan tabel di atas beban penyusutan dan amortisasi mengalami kenaikan sebesar 17,52 persen. Penghitungan penyusutan dilakukan setiap semester sekali untuk aset tetap dan aset lainnya. Penyusutan peralatan dan mesin mengalami kenaikan sebesar 22,81 persen dikarenakan terdapat beberapa item peralatan dan mesin yang telah habis masa manfaatnya sehingga nilai bukunya Rp0,00. Amortisasi aset lainnya adalah penyusutan/amortisasi aset tak berwujud berupa software. Amortisasi software mengalami penurunan sebesar 17,64 persen dikarenakan adanya transfer masuk dari BPS Provinsi Jawa Tengah.

Surplus dari
Kegiatan
Non
Operasional
Rp56.587.
182,00

D.8. Kegiatan Non Operasional

Pos dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari kegiatan non operasional sampai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut;

Tabel 40
Rincian Kegiatan Non Operasional
sampai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Naik(Turun)%
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	59.575.757	3.600.000	1.554,88
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	185.000	37.800.000	99,51
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Beban Persediaan Rusak/Usang	3.173.575	102,575	2.993,91
Jumlah	56.587.182	41.297.425	37,02

Surplus kegiatan non operasional per 31 Desember 2023 sebesar Rp56.587.182,00 sedangkan per 31 Desember 2022 surplus sebesar Rp41.297.425,00. Surplus kegiatan non operasional tersebut berasal dari pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp59.575.757,00 dan penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar

Rp185.000,00 dikurangi beban persediaan rusak/usang sebesar Rp3.173.575,00. Sedangkan pada periode pelaporan tahun sebelumnya surplus berasal dari Pendapatan dari pemindahtangan BMN Lainnya yang diperoleh dari penjualan peralatan dan mesin serta serial lainnya yang telah dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah sebesar Rp3.600.000,00 dan penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp37.800.000,00 dikurangi beban persediaan rusak/usang sebesar Rp102.575,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp4.230.139.
412,00

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 1 Januari 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.230.139.412,00 dan Rp4.343.035.622,00. Dibandingkan dengan awal periode 2022 terjadi penurunan nilai ekuitas awal sebesar Rp112.896.210,00. Nilai ekuitas awal sebesar Rp4.230.139.412,00 merupakan saldo akhir ekuitas per 31 Desember 2022.

Defisit LO
Rp5.515.919.
464,00

E.2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp5.515.919.464,00 dan Rp6.828.904.197,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Nilai defisit LO berasal dari belanja barang yang tidak menghasilkan aset selama periode pelaporan dan sudah terpakai atau menjadi beban dalam laporan operasional. Nilai Defisit-LO per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.312.984.733,00 atau 19,23 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan terjadi penurunan beberapa pos pada beban operasional yaitu beban pegawai, beban barang dan jasa, beban perjalanan dinas serta beban penyusutan dan amortisasi.

Transaksi
Antar Entitas
Rp5.708.253.
431,00

E.3. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.708.253.431,00 dan Rp6.716.007.987,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 41
Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Jenis	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Ditagihkan ke Entitas Lain	5.379.793.774	6.690.327.748
Diterima dari Entitas Lain	(61.993.647)	(42.364.032)
Transfer Keluar	(23.785.714)	0
Transfer Masuk	414.239.018	68.044.271
Jumlah	5.708.253.431	6.716.007.987

Nilai transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1.007.754.556,00 atau 15,01 persen. Penurunan pos Ditagihkan ke entitas lain (DKEL) dikarenakan alokasi anggaran pada periode pelaporan tahun sebelumnya lebih besar. Sedangkan kenaikan pos Diterima dari entitas lain (DDEL) dikarenakan pada periode pelaporan terdapat pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya selain pendapatan sewa rumah dinas dan penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu.

Untuk transfer masuk yang berasal dari BPS Provinsi Jawa Tengah pada periode pelaporan berupa barang konsumsi dan peralatan dan mesin yang terdiri dari P.C, scanner, Uninterruptable Power Suplly (UPS) dan yang berasal dari BPS Kabupaten Temanggung berupa alat angkutan sepeda motor. Sedangkan transfer keluar ke BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS Kebumen dan BPS Purworejo masing-masing berupa 1 unit sepeda motor. Nilai transaksi antar entitas diperoleh dari nilai ditagihkan ke entitas lain ditambah nilai transfer masuk dikurangi diterima dari entitas lain.

E.3.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada satuan kerja yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar (Rp61.993.647,00) sedangkan DKEL sebesar Rp5.379.793.774,00.

Diterima dari entitas lain (DDEL) mengalami kenaikan sebesar Rp19.629.615,00 atau 46,34 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut dikarenakan pada periode pelaporan terdapat pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya, pendapatan sewa dan penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu.

Sedangkan Ditagihkan ke entitas lain (DKEL) mengalami penurunan sebesar Rp1.310.533.974,00 atau 19,59 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan pada periode sebelumnya terdapat kegiatan kegiatan besar Regsosek dan Sensus Penduduk 2020 Lanjutan (SP2020-LF) yang mana anggarannya lebih besar.

E.3.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-

BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp414.239.018,00. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp23.785.714,00. Aset diterima merupakan transfer masuk dari BPS provinsi Jawa Tengah sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp414.239.018,00 berupa instrument dan kelengkapan kegiatan survei dan peralatan mesin sebagaimana terinci dalam mutasi persediaan dan peralatan dan mesin.

*Tabel 42
Rincian Nilai Transfer Masuk Per 31 Desember 2023*

Entitas Asal	Jenis	Aset Diterima	Akumulasi Transaksional	Nilai Buku Aset (Rp)
BPS Provinsi Jawa Tengah	Barang Konsumsi	27.459.017	0	27.459.017
BPS Kabupaten Temanggung	Peralatan dan Mesin	20.200.000	10.099.999	10.100.001
BPS Provinsi Jawa Tengah	Peralatan dan Mesin	376.680.000	0	376.680.000
Jumlah		424.339.017	10.099.999	414.239.018

Aset diterima merupakan transfer masuk dari BPS provinsi Jawa Tengah dan BPS Kabupaten Temanggung sampai dengan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Transfer masuk barang konsumsi dari BPS Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp27.459.017,00 berupa instrument, dokumen dan perlengkapan kegiatan Sakernas, Susenas, Seruti, Forum Konsultasi Publik (FKP), PL-KUMKM survei statistik produksi dan kegiatan rutin lainnya;
2. Transfer masuk Peralatan dan Mesin dari BPS Temanggung berupa sepeda motor merk Honda Verza sebanyak 1 unit/Rp20.200.00,00 sesuai BAST Nomor B-587.1/33230/PL.613/10/2023 tanggal 2 Oktober 2023;
3. Transfer masuk Peralatan dan Mesin dari BPS Provinsi Jawa Tengah berupa;
 - a. P.C Unit merk Acer Veriton M 17 sebanyak 12 unit/Rp336.000.000,00 dari BPS Provinsi Jawa Tengah sesuai BAST Nomor B-191.30/33510/PL.613/12/2023 tanggal 11 Desember 2023;
 - b. Scanner (Peralatan Personal Komputer) merk Epson Workforce DS-970 A4 Duplex Sheet Fed Documen Scanner sebanyak 1

unit/Rp21.000.000,00 dari BPS Provinsi Jawa Tengah sesuai BAST Nomor B-200.30/33510/PL.613/12/2023 tanggal 20 Desember 2023;

- c. Uninterruptable *Power Suplly* (UPS) merk ICA Line Interactive UPS CP1400 (1400VA_700W) sebanyak 12 unit/Rp19.680.000,00 dari BPS Provinsi Jawa Tengah sesuai BAST Nomor B-181.30/33510/PL.613/11/2023 tanggal 21 November 2023.

Akumulasi transaksional sebesar Rp10.099.999,00 berupa penyusutan peralatan dan mesin yang terbentuk dari satker asal yaitu BPS Kabupaten Temanggung.

Ekuitas Akhir
Rp4.422.473
.379,00

E.4. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.422.473.379,00 dan Rp4.422.473.379,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Nilai ekuitas menggambarkan kekayaan yang dimiliki oleh BPS kota Magelang pada akhir periode pelaporan. Nilai ekuitas akhir mengalami kenaikan sebesar Rp192.333.967,00 atau 4,55 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh penurunan pada pos Ditagihkan ke entitas lain (DKEL).

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak ada.

F.2. Pengungkapan Lain-Lain

F.2.1 Pengelola Anggaran

Pada bulan Maret tahun 2023 telah terjadi perubahan atau penggantian Pejabat Pengelola Anggaran BPS Kota Magelang. Perubahan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran karena ada rotasi pegawai ataupun adanya pegawai yang memasuki purna tugas di lingkungan Badan Pusat Statistik sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 47/PA/2023 tanggal 2 Maret 2023 tentang perubahan kedua atas keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 334/PA/2022 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2023 di wilayah provinsi Jateng.

Semula : Sri Herawati, S.Si, M.Si
Menjadi : Aluisius Abrianta, SST, M.A

F.2.2 Revisi Anggaran

Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Magelang selama periode laporan adalah sebanyak 4 kali dengan rincian:

1. Revisi DIPA ke-1 yaitu revisi DJA yang dilakukan berdasarkan surat dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022 tentang Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023 yang ditindaklanjuti dengan surat Kepala BPS Nomor : B-507/01000/PR.440/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Revisi Anggaran dalam rangka Automatic Adjustment TA 2023. Automatic Adjustment dilakukan dengan mencantumkan anggaran ke dalam catatan halaman IV DIPA (blokir). Kegiatan yang anggarannya masuk dalam AA diantaranya adalah 2907.BMA, Sebagian 2907.QMA, Sebagian 2910.QMA.006. Revisi disahkan pada tanggal 28 Desember 2022 dengan pagu anggaran tetap.

Program	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi-1 (Rp)	Selisih (Rp)
DUKMAN	4.251.716.000	4.251.716.000	-
PPIS	1.949.201.000	1.949.201.000	-
JUMLAH	6.200.917.000	6.200.917.000	-

2. Revisi DIPA ke-2 dilakukan berdasarkan surat dari Kepala BPS Nomor : B-235/02100/PR.400/02/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Revisi Anggaran dalam rangka Penyesuaian Kegiatan Tahun 2023. Dalam revisi ini dilakukan realokasi anggaran baik dari BPS pusat maupun BPS Provinsi Jawa Tengah ke BPS kabupaten/Kota dan penyesuaian rate honor kegiatan sensus maupun survei untuk pegawai organik dan mitra. Penyesuaian anggaran dan kegiatan serta realokasi anggaran pada program Dukman dan PPIS diantaranya pembatalan anggaran dan kegiatan Susenas Modul Ketahanan Sosial, menambah kegiatan Survei Ekonomi Rumah Tangga Triwulanan (Seruti), penambahan KRO baru untuk kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral. Revisi disahkan pada tanggal 27 Februari 2023.

Program	Pagu Revisi-1 (Rp)	Pagu Revisi-2 (Rp)	Selisih (Rp)
DUKMAN	4.251.716.000	4.252.166.000	450.000
PPIS	1.949.201.000	1.971.901.000	22.700.000
JUMLAH	6.200.917.000	6.224.067.000	23.150.000

Dalam revisi ini pagu anggaran bertambah sebesar Rp23.150.000,00, sehingga total pagu menjadi Rp6.224.067.000,00. Penambahan tersebut terdiri dari :

- a. Program Dukman bertambah sebesar Rp450.000,00 pada Rincian Output (RO) Layanan Reformasi Kinerja (2886.EBD.961) berupa tambahan anggaran transport lokal interview dan visitasi Pemda ;
- b. Program PPIS bertambah sebesar Rp22.700.000,00 berupa penambahan pagu pada anggaran kegiatan Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik (2897.BDB.003) sebesar Rp3.000.000,00, anggaran Neraca Pengeluaran (2898.BMA.007) sebesar Rp900.000,00, anggaran Neraca Produksi (2899.BMA.006) sebesar Rp5.985.000,00, anggaran Metodologi Sensus dan Survei (2900.BMA.005) sebesar Rp1.146.000,00, anggaran Pengembangan Statistik Distribusi (2902.BMA.004) sebesar Rp7.548.000,00, anggaran Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian (2904.BMA.006) sebesar Rp3.050.000,00, anggaran Sakernas (2905.BMA.004) sebesar Rp2.880.000,00, anggaran Statistik E-commerce (2908.QMA.009) sebesar Rp216.000,00, anggaran ST2023 (2910.QMA.006) sebesar Rp104.467.000,00, anggaran KSA (2910.QMA.010) sebesar Rp5.990.000,00 dan pengurangan anggaran Statistik Harga (2903.BMA.009) sebesar (Rp410.000,00), pengurangan anggaran

Susenas (2906.BMA.006) sebesar (Rp23.170.000,00), pengurangan anggaran Regsosek (2907.QMA.009) sebesar (Rp88.902.000,00).

3. Sehubungan dengan kebutuhan belanja dalam rangka data cleaning Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 2023 serta kebutuhan realokasi anggaran beberapa kegiatan Survei Statistik Produksi dan Neraca Wilayah & Analisis Statistik, maka BPS Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah diinstruksikan untuk melakukan revisi DIPA antar satker. Revisi DIPA ke-3 dilaksanakan berdasarkan surat kepala BPS Provinsi Jawa Tengah nomor : B-647/33000/PR.400/03/2023 tanggal 16 Maret 2023 tentang Revisi Anggaran Antar Satker BPS se-Jawa Tengah.

Proses revisi dilaksanakan oleh BPS Provinsi Jawa Tengah ke DJPB, dan disahkan pada tanggal 31 Maret 2023. Dalam revisi kali ini anggaran bertambah sebesar Rp.8.899.000,00, sehingga pagu anggaran setelah revisi menjadi Rp6.232.966.000,00. Penambahan anggaran berasal dari realokasi kegiatan dan anggaran neraca pengeluaran, Statistik Keuangan, Teknologi informasi & Pariwisata serta Statistik *E-Commerce*.

Program	Pagu Revisi-2 (Rp)	Pagu Revisi-3 (Rp)	Selisih (Rp)
DUKMAN	4.252.166.000	4.252.166.000	-
PPIS	1.971.901.000	1.980.800.000	8.899.000
JUMLAH	6.224.067.000	6.232.966.000	8.899.000

4. Revisi DIPA ke-4 dilaksanakan dalam rangka revisi POK dan halaman III DIPA untuk perbaikan nilai IKPA dimana jadwal penyesuaian RPD halaman III DIPA Triwulan I dan rencana penarikan dana Triwulan II maksimal tanggal 17 April 2023 diterima oleh Kanwil DJPB setempat. Revisi disahkan pada tanggal 16 April 2023.

Program	Pagu Revisi-3 (Rp)	Pagu Revisi-4 (Rp)	Selisih (Rp)
DUKMAN	4.252.166.000	4.252.166.000	-
PPIS	1.980.800.000	1.980.800.000	-
JUMLAH	6.232.966.000	6.232.966.000	-

5. Revisi DIPA ke-5 dilaksanakan berdasarkan surat Kepala BPS Nomor : B-981/02100/PR.440/06/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Revisi Anggaran untuk Mengakomodir Penyesuaian Kegiatan Tahun 2023. Pada revisi ini dilakukan realokasi anggaran untuk penyesuaian anggaran berupa pengurangan sisa pagu kegiatan Regsosek yang tidak akan terserap,

penambahan anggaran ST2023, penambahan anggaran belanja jasa manajemen building untuk mengakomodir anggaran Outsourcing PPNPN di BPS Kota Magelang sebanyak 5 orang.

Program	Pagu Revisi-4 (Rp)	Pagu Revisi-5 (Rp)	Selisih (Rp)
DUKMAN	4.252.166.000	4.283.464.000	31.298.000
PPIS	1.980.800.000	1.943.870.000	(36.930.000)
JUMLAH	6.232.966.000	6.227.334.000	(5.632.000)

Dalam revisi ini pagu anggaran total berkurang sebesar (Rp5.632.000,00,) sehingga total pagu menjadi Rp6.227.334.000,00. Pengurangan tersebut tersebut terdiri dari :

- a. Program Dukman bertambah sebesar Rp31.298.000,00 berupa penambahan anggaran management building sebesar Rp29.672.000,00 dan penambahan anggaran untuk kegiatan Layanan Reformasi Kinerja berupa anggaran sosialisasi tim penilai internal sebesar Rp1.626.000,00.
- b. Program PPIS berkurang sebesar (Rp36.930.000,00) berupa penambahan anggaran transport local pemeriksaan ground check SBR sebesar Rp300.000,00, anggaran Regsosek berkurang sebesar (Rp39.454.000,00) dan anggaran pengolahan kegiatan ST2023 bertambah sebesar Rp2.224.000,00.

Hasil revisi DIPA ini disahkan pada tanggal 11 Juli 2023.

6. Revisi DIPA ke-6 berdasarkan surat dari BPS Provinsi Jawa Tengah Nomor : B-1250/33000/PR.440/07/2023 tanggal 12 Juli 2023 tentang Revisi Anggaran dalam rangka Penyesuaian Belanja Pegawai yang berasal dari Blokir *Automatic Adjustment* TA 2023 yang menindak lanjuti surat dari Sekretaris Utama BPS Nomor : B-484/02000/PR.440/07/2023 tanggal 11 Juli 2023 yang menginstruksikan kepada seluruh satker untuk melakukan penyesuaian/pemotongan anggaran belanja pegawai yang berasal dari *Automatic Adjustment* berupa pagu anggaran Tunjangan Kinerja. Revisi dilakukan dengan cara menghapus tanda bintang dan pagu dikurangi sebesar nilai AA di aplikasi Sakti.

Program	Pagu Revisi-5 (Rp)	Pagu Revisi-6 (Rp)	Selisih (Rp)
DUKMAN	4.283.464.000	4.055.906.000	(227.558.000)
PPIS	1.943.870.000	1.943.870.000	-
JUMLAH	6.227.334.000	5.999.776.000	(227.558.000)

Dalam revisi kali ini pagu anggaran berkurang sebesar (Rp227.558.000,00) sehingga total pagu BPS Kota Magelang setelah revisi adalah sebesar Rp.5.999.776.000,00, hasil revisi disahkan pada tanggal 17 Juli 2023.

7. Revisi DIPA ke-7 dilaksanakan berdasarkan surat dari BPS Provinsi Jawa Tengah Nomor : B-1760/33000/PR.440/09/2023 tanggal 22 September 2023 tentang Revisi Anggaran Antar Satker. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan belanja pegawai dan belanja operasional satker serta kebutuhan pelaksanaan Pembinaan Desa Cantik dan Sosialisasi Kegiatan Statistik di seluruh BPS Kabupaten/Kota, maka perlu dilakukan pergeseran anggaran pada program Dukman dan PPIS dengan realokasi anggaran antar satker se-Jawa Tengah.

Pada revisi kali ini yang semula rencananya akan dilakukan revisi antar satker di Kanwil DJPB, namun ditengah proses berlangsung datang instruksi untuk dilakukan revisi DJA oleh BPS RI, dalam revisi kali ini pagu anggaran kegiatan Sensus Pertanian berkurang sebesar (Rp225.907.000,00) penambahan anggaran untuk kegiatan pembinaan Desa cantik sebesar Rp5.094.000,00. Untuk anggaran Dukman berkurang sebesar (Rp156.786.000,00) yang terdiri dari anggaran gaji dan tunjangan serta pengadaan barang persediaan.

Program	Pagu Revisi-6 (Rp)	Pagu Revisi-7 (Rp)	Selisih (Rp)
DUKMAN	4.055.906.000	3.899.120.000	(156.786.000)
PPIS	1.943.870.000	1.723.057.000	(220.813.000)
JUMLAH	5.999.776.000	5.622.177.000	(377.599.000)

Dalam revisi kali ini pagu anggaran berkurang sebesar (Rp377.599.000,00) sehingga total pagu BPS Kota Magelang setelah revisi adalah sebesar Rp.5.622.177.000,00, hasil revisi disahkan pada tanggal 06 Oktober 2023.

8. Revisi DIPA ke-8 dilaksanakan berdasarkan surat dari BPS Provinsi Jawa Tengah Nomor : B-1888/33000/PR.440/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023 tentang Revisi Anggaran dalam rangka Penyelesaian Relaksasi Non Belanja Pegawai Automatic Adjustment TA2023. Menindaklanjuti surat Sekretaris Utama BPS Nomor B-1179/02000/PR.440/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023 perihal Revisi Anggaran dalam rangka Penyelesaian Relaksasi Non Belanja Pegawai Automatic *Adjustment* TA2023, revisi dilakukan dengan cara menghapus pagu anggaran yang masuk dalam self bloking *Automatic Adjustment* di aplikasi Sakti.

Program	Pagu Revisi-7 (Rp)	Pagu Revisi-8 (Rp)	Selisih (Rp)
DUKMAN	3.899.120.000	3.899.120.000	-
PPIS	1.723.057.000	1.501.422.000	(221.635.000)
JUMLAH	5.622.177.000	5.400.542.000	(221.635.000)

Dalam revisi kali ini pagu anggaran berkurang sebesar (Rp221.635.000,00) sehingga total pagu BPS Kota Magelang setelah revisi adalah sebesar Rp.5.400.542.000,00, hasil revisi disahkan pada tanggal 21 Oktober 2023.

9. Revisi DIPA ke-9 dilaksanakan berdasarkan surat dari BPS Provinsi Jawa Tengah Nomor : B-2211/33000/PR.440/11/2023 tanggal 23 November 2023 tentang Revisi Anggaran Antar Satker TA 2023. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan belanja pegawai dan belanja operasional perkantoran satuan kerja BPS di wilayah Provinsi Jawa Tengah, maka BPS Kabupaten/Kota diinstruksikan untuk melakukan penyesuaian anggaran pada POK masing – masing. Penyesuaian anggaran dilakukan dengan mekanisme revisi DIPA antar satker ke Kanwil DJPb Jawa Tengah.

Program	Pagu Revisi-8 (Rp)	Pagu Revisi-9 (Rp)	Selisih (Rp)
DUKMAN	3.899.120.000	3.929.215.000	30.095.000
PPIS	1.501.422.000	1.501.422.000	-
JUMLAH	5.400.542.000	5.430.637.000	30.095.000

Dalam revisi kali ini pagu anggaran bertambah sebesar Rp30.095.000,00 berupa penambahan anggaran untuk pemeliharaan Gedung dan bangunan sehingga total pagu BPS Kota Magelang setelah revisi adalah sebesar Rp.5.430.637.000,00, hasil revisi disahkan pada tanggal 30 November 2023.

10. Revisi DIPA ke-10 dilakukan dalam rangka pemutakhiran data POK Tahun 2023, Revisi POK yang dilakukan oleh satker hingga akhir Desember 2023 wajib disampaikan ke kanwil DJPb dengan mekanisme revisi DIPA. Selama bulan Desember dalam rangka mengoptimalkan penyerapan anggaran maka BPS Kota Magelang melakukan revisi POK dan sudah dilakukan revisi penyamaan data POK ke Kanwil DJPb tanggal 22 Desember 2023 adk revisi turun tanggal 27 Desember 2023.

Program	Pagu Revisi-9 (Rp)	Pagu Revisi-10 (Rp)	Selisih (Rp)
DUKMAN	3.929.215.000	3.929.215.000	-
PPIS	1.501.422.000	1.501.422.000	-
JUMLAH	5.430.637.000	5.430.637.000	-

F.2.3 Kartu Kredit Pemerintah

Berdasarkan PMK Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah berlaku mulai tanggal 01 Juli 2019. Kartu Kredit Pemerintah merupakan Kartu Kredit Corporate (*Corporate card*) yang diterbitkan oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah. Dikarenakan pada tahun ini semua satker diwajibkan untuk menggunakan KKP Domestik. KKP domestik adalah Kartu Kredit Pemerintah dengan menggunakan skema pembayaran domestik dalam negeri, tidak bisa digunakan untuk pembayaran di luar negeri, maka BPS Kota Magelang juga mengajukan permohonan penggunaan KKP Domestik.

Pada awal tahun anggaran BPS Kota Magelang mengajukan UP tunai sebesar Rp15.000.000,00. Pada bulan Februari 2023 KKPN mengadakan FGD terkait kewajiban penggunaan KKP domestik sehingga pada bulan Februari kami melakukan penihilan pengajuan UP tunai tersebut. Pada saat melakukan nihil UP ada pengembalian sisa UP sebesar Rp34,00 melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan nomor NTPN2973C45!QMGBII42 tanggal 28 Februari 2023 sebagaimana terlampir pada lampiran lainnya. Setelah melakukan nihil UP tunai maka kami mengajukan UP Kembali dengan besaran yang sama dan diproporsi menjadi 60% UP tunai dan 40% UP KKP. Untuk UP tunai sebesar Rp9.000.000,00 dan untuk UP KKP sebesar Rp6.000.000,00.

Proses pengajuan KKP sudah kami tindaklanjuti dengan membuat PKS antara BPS Kota Magelang dengan BRI cabang Magelang dengan nomor : 102/33710/KU.380/03/2023 dan Nomor : B. /KC-VII/LYI/03/2023 tanggal 27 Maret 2023. Sedangkan fisik dari KKP baru diterima oleh Bendahara BPS Kota Magelang pada minggu akhir bulan September 2023, sudah dicoba untuk diaktifkan dan dicoba untuk digunakan untuk pembayaran belanja di digipay. Namun ternyata KKP tersebut tidak bisa digunakan untuk bertransaksi karena tidak ada kode CVV sebagai syarat pembayaran di transaksi digipay karena hanya KKP Domestik. Pada akhir bulan November 2023 dilakukan migrasi untuk KKPD ke Kartu Kredit Indonesia namun sampai akhir Desember 2023 kartu kredit tersebut belum digunakan untuk transaksi karena belum sempat untuk diaktifkan.

F.2.4 Market Place/Govstore

BPS Kota Magelang menggunakan *marketplace digipay002.id* sampai dengan bulan Maret 2023, selama 3 bulan terdapat transaksi melalui digipay002 sebanyak 6 transaksi.

Semenjak bulan April 2023 *marketplace digipay* bermigrasi menjadi *digipaysatu* yang beralamat di digipaysatu.kemenkeu.go.id. Untuk user yang terlibat adalah admin sekaligus pemesan, PBJ, PPK dan bendahara. Untuk user admin pendaftaran dilakukan melalui KPPN untuk disapprove oleh KPPN sedangkan user lainnya mendaftarkan secara mandiri dan disapprove oleh admin satker.

Sampai dengan akhir bulan September 2023 BPS Kota Magelang telah melakukan transaksi belanja melalui *marketplace digipaysatu* sebanyak 30 transaksi. Berupa pembelian konsumsi rapat, computer supplies dan pekerjaan pemeliharaan perbaikan printer maupun PC dan laptop. Pembayaran belanja di *digipay* dilakukan dengan dana UP melalui transfer CMS dari rekening bendahara ke rekening rekanan.

F.2.5 Kerjasama/Swakelola

Tidak terdapat kerjasama/swakelola pada periode pelaporan.

F.2.6 Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2022

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2022, terdapat temuan berupa pendapatan denda lainnya. Rincian tindak lanjut Temuan Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2022 pada BPS Kota Magelang sebagaimana di bawah ini.

REKAPITULASI TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2022
Pada Satuan Kerja BPS Kota Magelang

No.	Uraian Temuan	Tindak Lanjut
1.	Pengenaan denda untuk petugas yang tidak melaksanakan pencacahan/mengundurkan diri	Mencatat reklasifikasi akun pengembalian belanja menjadi pendapatan denda lainnya atas pengenaan denda untuk petugas yang tidak melaksanakan pencacahan pada periode 14 sebesar Rp1.178.000,00 dicatat melalui jurnal manual pada aplikasi SAKTI (modul GLP) dan perbaikan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 (Audited)

F.2.7 Laporan Pelaksanaan Asuransi BMN

Sesuai amanat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KM.6/2020 Tentang Tahapan Pelaksanaan Pengasuransian Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga, terhitung mulai tahun anggaran 2023 pengasuransian

BMN harus dilaksanakan pada seluruh Kementerian/Lembaga dengan objek asuransi yaitu:

- a. Gedung dan bangunan yang digunakan sebagai kantor:
- b. Gedung dan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pendidikan; dan/atau
- c. Gedung dan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas kesehatan

Pada tahun 2023, Badan Pusat Statistik telah melaksanakan pengasuransian BMN sesuai objek asuransi di atas untuk BMN dengan prioritas yang berlokasi di Pusat dan yang memiliki Indeks Resiko Bencana Tinggi. Jangka waktu pertanggungungan mulai tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan penanggung asuransi BMN adalah Konsorsium Asuransi BMN (Ketua PT Asuransi Jasa Indonesia). Nomor polis 204.235.110.23.00033/000/000 dengan wording polis adalah polis standar asuransi BMN AAUI/2019 yang diperluas dengan klausula dan tarif premi 1,961 permil per tahun.

Rincian pelaksanaan asuransi BMN pada BPS Kota Magelang sebagaimana di bawah ini.

No	Data BMN yang diasuransikan				Nilai Pertanggungngan (Rp)	Data Pengajuan dan Penyelesaian Klaim (Rp)
	Uraian BMN	NUP	Tahun Bangun	Lokasi		
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	2009	Jalan Gatot Subroto No.54 D, Kel. Jurangombo Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang	685.814.380	1.344.882

F.2.8 Pengungkapan BMN Lainnya

1. Pada periode Semester I Tahun 2023 telah terbit surat keputusan Kepala BPS RI tentang Penetapan Status Penggunaan BMN dengan Nomor 278 Tahun 2023 tanggal 14 Mei 2023 sebanyak 7 buah/Rp23.442.500,00 berupa peralatan dan mesin berdasarkan usulan Kepala BPS Kota Magelang nomor B-157/33710/PL.500/03/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang merupakan BMN dengan periode perolehan sampai dengan 31 Desember 2022.
2. Pada periode semester II Tahun 2023 telah terbit surat keputusan Kepala BPS RI tentang Penetapan Status Penggunaan BMN dengan Nomor 568 Tahun 2023 tanggal 31 Agustus 2023 sebanyak 7 buah/Rp37.200.000,00

berupa peralatan dan mesin berdasarkan surat usulan Penetapan Status Penggunaan Kepala BPS Kota Magelang Nomor B-587/33710/PL.500/07/2023 tanggal 8 Agustus 2023 perihal Permohonan Penetapan Status Penggunaan BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan BPS Kota Magelang.

3. Penetapan Status Penggunaan peralatan dan mesin berupa sepeda motor (transfer masuk dari BPS Temanggung) sesuai usulan Kepala BPS Kota Magelang Nomor B-885/33710/PL.500/11/2023 tanggal 27 November 2023 perihal permohonan Penetapan Status Penggunaan BMN pada Satker BPS Kota Magelang telah terbit Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan dari KPKNL Semarang dengan nomor 363/KM.6/KNL.0901/2023 tanggal 7 Desember 2023.
4. Alat angkutan yang dilakukan Pencatatan Barang yang Akan dihapuskan (Usulan Penghapusan ke Pengelola) sebanyak 9 unit/Rp143.893.900 sesuai usulan nomor B-686/33710/PL.810/09/2023 tanggal 15 September 2023 sengan kondisi rusak berat berdasarkan surat pernyataan Kepala BPS kota Magelang Nomor B-668/33710/PL.520/09/2023 tanggal 12 September 2023. Pada Tahun 2023 telah terbit persetujuan Penjualan BMN selain Tanah dan/atau bangunan pada Badan Pusat Statistik c.q Badan Pusat Statistik Kota Magelang nomor S-256/MK.6/KNL.0901/2023 tanggal 27 September 2023. Pada tanggal 16 November 2023 telah dilakukan lelang sesuai nomor risalah lelang Nomor 1845/37/2023. Sampai tanggal pelaporan sudah diusulkan SK penghapusan ke BPS RI sesuai surat usulan kepala BPS Kota Magelang Nomor B-903/33710/PL.810/11/2023 tanggal 30 November 2023 dan terbit SK penghapusannya Nomor 910 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 sehingga BMN tersebut telah dikeluarkan dari SAKTI dengan melakukan entri penghapusan BMN.
5. Berdasarkan surat Kepala BPS Kota Magelang nomor B-501/33710/PL.810/07/2023 tanggal 5 Juli 2023 BPS Kota Magelang mengajukan usulan permohonan persetujuan barang persediaan sisa survey/sensus untuk barang usang dan rusak sebanyak 4.967 set/Rp3.276.150,00, dan telah terbit surat persejutan pemusnahan nomor B-1278/02500/PL.810/09/2023 tanggal 21 September 2023. Tindak lanjut atas persetujuan pemusnahan tersebut telah dilakukan pemusnahan dokumen dengan nomor Berita Acara Pemusnahan Nomor B-770/33710/PL.810/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023. Sampai dengan akhir

periode pelaporan BPS Kota Magelang telah mengajukan usulan Surat Keputusan Penghapusan ke BPS RI dengan nomor surat B-770/33710/PL.810/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023.

6. Surat Usulan Penghapusan BMN kepala BPS Kota Magelang ke Pengelola Barang dengan nomor surat B-803/33710/PL.810/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023 perihal Izin/Persetujuan penghapusan BMN pada BPS Kota Magelang yang berupa 23 buah peralatan dan mesin dengan nilai Rp257.316.227,00 sampai dengan tanggal pelaporan belum terbit surat persetujuan penghapusan.
7. Penghentian Aset dari penggunaan berupa barang ekstrakomptabel Alat kantor dan alat rumah tangga sebanyak 3 buah/Rp381.000,00 berdasarkan surat pernyataan Kepala BPS Kota Magelang nomor B-780/33710/PL.520/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023

